

**ANALISIS PENGARUH *GENDER GAP* DAN PENGELUARAN
PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP
PEMBANGUNAN MANUSIA BERBASIS GENDER DI INDONESIA**

(Skripsi)

Oleh:

**LATIFFA AURELIEN PUTRI A.B
NPM. 2011021042**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**ANALISIS PENGARUH *GENDER GAP* DAN PENGELUARAN
PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP
PEMBANGUNAN MANUSIA BERBASIS GENDER DI INDONESIA**

Oleh

LATIFFA AURELIEN PUTRI A.B

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI**

Pada

**Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH *GENDER GAP* DAN PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP PEMBANGUNAN MANUSIA BERBASIS GENDER DI INDONESIA

OLEH

LATIFFA AURELIEN PUTRI A.B

Paradigma yang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dari dimensi pembangunan manusia bukan hanya pendapatan per kapita. Meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat merupakan tujuan pembangunan ekonomi. Dalam hal mewujudkan tujuan dan harapan pembangunan dibutuhkan banyak upaya tanpa adanya bias antara gender, suku, ras, agama, dan golongan. Namun, pada pelaksanaannya upaya-upaya tersebut masih mengabaikan masalah kesetaraan dan keadilan dengan adanya perbedaan antara peran laki-laki dan perempuan sebagai pelaku dan penerima hasil pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara rata-rata lama sekolah, rata-rata upah, tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan serta pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan gender di 34 Provinsi Indonesia pada tahun 2013-2022. Metode analisis yang digunakan adalah pengujian kesesuaian model, pengujian asumsi klasik, model regresi linier data panel, uji hipotesis parsial (uji t) dan simultan (uji F), serta koefisien diterminasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah, rata-rata upah, dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan gender, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan gender. Hasil lainnya adalah bahwa terdapat perbedaan pengaruh variabel bebas yang digunakan dengan variabel terikat antara data laki-laki dan perempuan dalam taraf signifikansi tertentu.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Gender (IPG), Gender, Rata-Rata Lama Sekolah, Rata-Rata Upah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Pengeluaran Pemerintah

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECT OF THE GENDER GAP AND GOVERNMENT EXPENDITURE IN EDUCATION AND HEALTH SECTOR ON HUMAN DEVELOPMENT GENDER BASED IN INDONESIA

BY

LATIFFA AURELIEN PUTRI A.B

The paradigm that is currently developing is that economic growth is measured from the dimension of human development, not just per capita income. Increasing welfare and improving people's quality of life is the goal of economic development. In terms of realizing development goals and hopes, a lot of effort is needed without any bias between gender, ethnicity, race, religion and class. However, in practice these efforts still ignore issues of equality and justice with the differences between the roles of men and women as actors and recipients of development results. This research aims to determine the influence of average years of schooling, average wages, labor force participation rates for men and women as well as government expenditure in education and health on the gender development index in 34 Indonesian provinces in 2013-2022. The analytical methods used are model suitability testing, classical assumption testing, panel data linear regression models, partial (t test) and simultaneous hypothesis testing (F test), and termination coefficients. The research results show that the average number of years of schooling, average wage, and government spending on education have a positive and significant effect on the gender development index, while the level of labor force participation and government spending on health do not have a significant effect on the gender development index. Another result is that there is a difference in the influence of the independent variable used and the dependent variable between male and female data at a certain level of significance.

Keywords: Gender Development Index (GDI), Gender, Average Years of Schooling, Average Wage, Labor Force Participation Rate, Government Expenditure

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Gender Gap dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pembangunan Manusia Berbasis Gender di Indonesia

Nama Mahasiswa : Latiffa Aurelien Putri AB

Nomor Pokok Mahasiswa : 2011021042

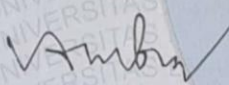
Jurusan : S1 Ekonomi Pembangunan

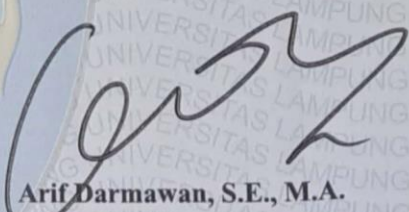
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing I

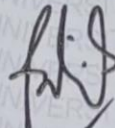
Komisi Pembimbing II


Prof. Dr. Ambya, S.E., M.Si
NIP. 19590719 198703 1 002


Arif Darmawan, S.E., M.A.
NIP. 19900621 201903 1 010

MENGETAHUI

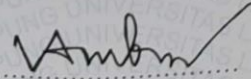
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan


Dr. Arivina Ratih YT, S.E., M.M.
NIP. 19800705 200604 200 2

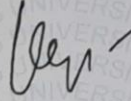
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Ambya, S.E., M.Si.



Penguji I : Moneyzar Usman, S.E., M.Si.



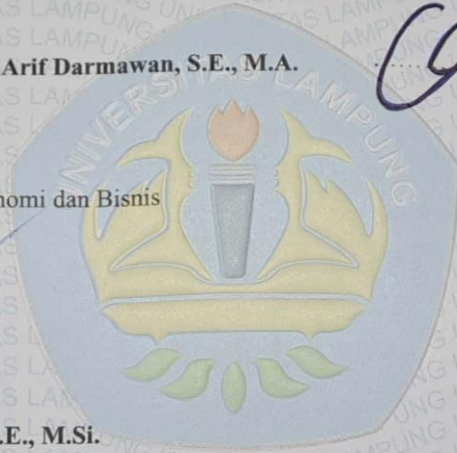
Penguji II : Arif Darmawan, S.E., M.A.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 31 Oktober 2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Latiffa Aurelien Putri A.B

NPM : 2011021042

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Pengaruh Gender Gap dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pembangunan Manusia Berbasis Gender di Indonesia” adalah hasil karya saya sendiri, dan dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan dari orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat pemikiran dari peneliri lain tanpa pengakuan peneliti aslinya. Apabila terdapat hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak, sepenuhnya tanggung jawab ada pada penyusun.

Bandar Lampung, 11 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Latiffa Aurelien Putri A.B

NPM. 2011021042

RIWAYAT HIDUP



Latiffa Aurelien Putri A.B lahir pada 23 Oktober 2002 di Kota Metro, Lampung. Penulis lahir sebagai anak pertama dari 3 bersaudara, dari pasangan Bapak Auric Ariefiyanto B dan Ibu Lina Ratna Ningsih.

Penulis memulai Pendidikan di TK Dewi Sartika Kota Metro pada tahun 2006 dan selesai di tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Dasar di SDN 4 Metro Timur dan tamat pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan Pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 4 Metro dan tamat pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan lagi ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan di SMKN 1 Metro dan tamat pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 penulis berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan diterima pada salah satu perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Lampung, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi dan berbagai kegiatan positif lainnya. Selama awal perkuliahan penulis menjadi anggota aktif UKM-F Rois FEB dan *Economics English Club* pada tahun 2020-2021. Tahun berikutnya penulis diamanahkan menjadi Kepala Departemen Kemuslimahan UKM-F Rois FEB pada tahun 2022, kemudian menjadi staff bidang akademik dan prestasi UKM-U Birohmah dan staff divisi prestasi UKM-U Panahan Unila pada tahun 2023. Pada tahun 2023 pula penulis mengikuti Studi Independen di bidang data scientist. Kemudian penulis magang di KPP Pratama Metro pada akhir 2023 hingga awal tahun 2024.

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Universitas Lampung Periode 1 Tahun 2023 di Pekon Sumberejo, Kecamatan Bangkumat, Kabupaten Pesisir Barat selama kurang lebih 40 hari. Selain berorganisasi, penulis mengikuti berbagai seminar, perlombaan dan kegiatan relawan baik dari intra maupun eksternal kampus. Penulis juga pernah mengikuti kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bersama para dosen.

MOTTO

“Jalani aja apa yang menjadi kemampuan kita, ada Allah”

(Bunda)

“Tetap jadi orang baik dan bermanfaat untuk orang lain kemanapun nanti pergi. Karena kita akan menuai apa yang kita tanam, walaupun ngga di dunia, nanti di sana.”

(Ayah)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhan-mu lah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah 94 : 6-8)

“Dalam hidup selalu pilihan, dan setiap pilihan punya resiko. Tinggal kita pilih, mana yang *we can live with that risk for the rest of our live*”

(Zhafira Aqila)

“If God put the dream in your heart, follow your guts. He wouldn't put in there for no reason”

*“Don't lose hope if it doesn't make sense to you.
We don't got to understand everything what Allah's plan is.”*

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan karunia, rahmat dan hidayahNya serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan ketulusan hati, aku persembahkan tulisan ini kepada:

Orang Tuaku tercinta

Ayah & Bunda

Terimakasih untuk segala yang telah diberikan dalam hidupku. Terimakasih atas segala pengorbanan, kesabaran, nasihat dan doa-doa yang kalian berikan untukku. Semoga Allah yang balas segala kebaikan kalian dengan kebaikan yang banyak. Semoga keluarga kita dilimpahkan keberkahan dan kebahagiaan dapat berkumpul lagi di Surga Allah.

Keluarga Besar,

Yang telah mendukung dan mendokan penulis

Sahabat-Sahabatku,

Yang telah menemani dan memberi warna dalam perjalanan perkuliahan ini

Para dosen dan civitas akademika,

Yang telah memberikan ilmu, motivasi dan inspirasi untuk dapat terus melangkah lebih jauh di masa depan

Almamater tercinta,

dan orang-orang baik yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

SANWACANA

Bismillahirrahmaanirrohiim,

Alhamdulillahrabbi'l'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Analisis Pengaruh Gender Gap dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pembangunan Manusia Berbasis Gender di Indonesia" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan berjalan baik jika tanpa bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Arivina Ratih YT, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Zulfa Emalia, S.E., M.Sc., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. Ambya, S.E. M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta memberikan ilmu dan sarannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Arif Darmawan, S.E., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang juga telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta memberikan ilmu, saran, dan masukan kepada penulis baik dalam penyusunan skripsi maupun selama proses perkuliahan.

6. Bapak Moneyzar Usman, S.E., M.Si., selaku Dosen Penguji I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan saran, masukan, dan nasihatnya kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini
7. Ibu Dr. Neli Aida, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembahas saat Semnar Proposal yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan saran dan masukannya yang membangun untuk memperbaiki penulisan skripsi.
8. Bapak Prayudha Ananta, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembahas saat Seminar Hasil yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan saran dan masukannya yang membangun dan memotivasi penulis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
9. Ibu Dr. Ida Budiarty, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihat dan bimbingan kepada penulis selama proses perkuliahan.
10. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan, motivasi, dan inspirasi selama masa perkuliahan, serta para staff dan pegawai di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah banyak membantu kelancaran proses skripsi ini.
11. Teristimewa, kedua orang tuaku, Ayah Auric Ariefiyanto B, A.Md. dan Bunda Lina Ratna Ningsih, A.Md. yang telah memberikan dukungan, pengorbanan, kasih sayang, doa, dan segalanya untuk kehidupanku hingga saat ini. Semoga berbalas kebaikan dan ridha dari Allah SWT, aamiin.
12. Adik-adik ku tersayang, Muhammad Linggar Maulana B dan Muhammad Tristan Al-Jaras B yang telah menemani dan memberikan warna dalam kehidupan penulis.
13. Seluruh Keluarga Besar (Alm) Albert Baeten dan Hermayani serta keluarga besar (Alm) H. M. Dachlan dan Hj. Arum Kasih, Opi, Apih, Nenek, Oma, Abah, Uwa, Om, Tante, Mami, Papi, Bibi, Emak, Bapak, Aa, Teteh, dan adik-adik sepupu yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
14. Teman-teman KRS, Desi, Annisa, Mila, Intan, Nadila, yang telah menemani dan meberikan warna di hari-hari penulis selama masa perkuliahan.

15. Teman-teman yang juga telah menemani penulis selama masa perkuliahan, Ritter, Nurrike, Amalia, Yunias, Lulu, Ummi, Echa, Vella, Oliv, dan teman-teman jurusan ekonomi pembangunan angkatan 2020.
16. Presi, pimpinan, pengurus dan anggota UKM-F Rois FEB, Ananta, Serli, Henni, Vani, Yesi, Berli, Alim, Wildhan, Bunga, Taufiq dan lainnya.
17. Anggota Paguyuban Penghuni Sekret, Ananta, Alfin, Vani, Dhillia, Peni, Amel, Muafah, Cio, Mba Vero, Ramdhan. Listo, Deni, Raihan, Kak Zaka, Agung, Zaki, Bagus, dan anggota UKM-U Panahan Unila lainnya.
18. Keluarga besar UKM-U Birohmah, khususnya departemen Akademik dan Prestasi 2023, Ananta, Hasna, Amel, Elsa, dan lainnya.
19. KKN Sumberejo, Pesisir Barat 2023, Cika, Vita, Shinta, Surya, Gio, Yoga.
20. Adik-adik angkatan, Putri, Sofi, Annisa, Lestari, Ghefi, Nurfa, Lintang, Lila, Lavina, Nyimas dan lainnya.
21. Orang-orang baik yang pernah ditemui selama masa perkuliahan baik intra maupun eksternal kampus dan seluruh pihak yang terlibat.
22. Almamater kebanggaan, Universitas Lampung.
23. Terkhusus untuk diriku sendiri, terimakasih sudah berjuang dan berusaha sejauh ini, Terimakasih sudah bertahan dan menerima takdir yang diberikan oleh-Nya dengan hanya mengharap ridha dari-Nya. Perjalanan kita masih panjang, semoga hanya hal-hal baik yang ditemui kedepannya. *See you when I see you in the next level.*

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat. Semoga segala doa, dukungan, dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis berbalas kebaikan dari Allah SWT. Aamiin ya rabbal alamin.

Bandar Lampung, 23 Oktober 2024

Penulis

Latiffa Aurelien Putri A.B

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Pustaka	13
2.1.1 Peran Pemerintah	13
2.1.2 Gender	14
2.1.3 Rata-Rata Lama Sekolah.....	18
2.1.4 Rata-Rata Upah	19
2.1.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	20
2.1.6 Pengeluaran Pemerintah.....	21
2.1.7 Indeks Pembangunan Gender.....	23
2.2 Landasan Teori.....	25
2.2.1 Teori <i>Human Capital</i>	25
2.2.2 Teori Pembangunan Manusia.....	25
2.2.3 Teori Ketimpangan Gender	26
2.2.4 Teori Pengeluaran Pemerintah	27
2.3 Tinjauan Empiris.....	28
2.4 Kerangka Penelitian	32
2.5 Hipotesis Penelitian.....	33
III. METODOLOGI PENELITIAN.....	35
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
3.2 Data dan Sumber Data	35
3.3 Variabel Penelitian	36

3.4 Metode Analisis	38
3.5 Tahap Pengujian.....	39
1. Model Regresi Data Panel.....	40
2. Uji Model Regresi	41
3. Uji Asumsi Klasik	42
4. Uji Keberartian Model atau Pengujian Hipotesis.....	45
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Analisis Statistik Deskriptif	47
4.1.1 Indeks Pembangunan Gender.....	47
4.1.2 Rata-Rata Lama Sekolah.....	48
4.1.3 Rata-Rata Upah	48
4.1.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	48
4.1.5 Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan	48
4.1.6 Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan.....	49
4.2 Uji Kesesuaian Model.....	49
4.2.1 Uji F (Uji Chow)	49
4.2.2 Uji Hausman	50
4.2.3 Uji Lagrange Multiplier (LM-Test)	50
4.3 Pengujian Asumsi Klasik	51
4.3.1 Uji Normalitas	51
4.3.2 Uji Heterokedastisitas	52
4.3.3 Uji Multikolinieritas.....	53
4.4 Hasil Estimasi Model Data Panel.....	55
4.5 Pengujian Hipotesis.....	55
4.5.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t).....	55
4.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F-Statistik)	59
4.5.3 Koefisien Determinasi (R^2).....	60
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian	61
4.6.1 Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Indeks Pembangunan Gender di 34 Provinsi Indonesia.....	63
4.6.2 Pengaruh Rata-Rata Upah Terhadap Indeks Pembangunan Gender di 34 Provinsi Indonesia.....	65

4.6.3 Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Indeks Pembangunan Gender di 34 Provinsi Indonesia.....	67
4.6.4 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Gender di 34 Provinsi Indonesia.....	68
4.6.5 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Gender di 34 Provinsi Indonesia.....	70
4.6.6 Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Rata-Rata Upah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Gender di 34 Provinsi Indonesia.....	71
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	48
Tabel 2. Hasil Uji Chow.....	49
Tabel 3. Hasil Uji Hausman	51
Tabel 4. Hasil Uji LM	52
Tabel 5. Uji Normalitas Skewness-Kurtosis	53
Tabel 6. Hasil Uji Heterokedastisitas	54
Tabel 7. Hasil Deteksi Multikolinieritas	55
Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi	55
Tabel 9. Hasil Estimasi Regresi	56
Tabel 10. Hasil Uji Parsial Persamaan 1	56
Tabel 11. Hasil Uji Parsial Persamaan 2	56
Tabel 12. Hasil Uji Parsial Persamaan 3	57
Tabel 13. Hasil Uji Simultan (Uji F).....	60
Tabel 14. Hasil Koefisien Determinasi	61
Tabel 15. Indeks Pembangunan Gender Indonesia 2013 dan 2022	62
Tabel 16. Hasil Perhitungan <i>Individual Effect</i> Tahun 2013-2022.....	73

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	33
Gambar 2. Hasil Uji Normalitas JB-test	52

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah gender memiliki pengertian tentang bagaimana seorang laki-laki dan perempuan diharapkan dapat berpikir atau bertindak, sesuai dengan ketentuan sosial dan juga budaya pada wilayah masing-masing dalam hal akses, peran, kontrol, tanggungjawab, hak, dan lain-lain. Gender dapat berlangsung dalam masyarakat karena adanya sistem kepercayaan gender. Sistem ini mencakup sikap terhadap peran dan perilaku yang dianggap sesuai bagi laki-laki dan perempuan yang kemudian membentuk suatu stereotip peran laki-laki dan perempuan (Dalimoenthe, 2020). Perbedaan gender umumnya melahirkan peran gender yang mengklasifikasikan peran laki-laki yang umumnya berada dalam ranah publik sedangkan perempuan berada di ranah domestik. Hal ini yang kemudian melahirkan ketidakadilan gender. Untuk itu diperlukan suatu pengertian positif yang ingin dicapai yaitu keadilan gender. Keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Keadilan tidak berarti bahwa harus sama dalam segala hal antara laki-laki dan perempuan, namun lebih merujuk pada pemberian akses dan kesempatan yang tidak berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Kesempatan dan akses yang dimaksud antara lain memberikan kontribusi pada perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, merealisasikan hak-hak dan potensinya, serta menikmati hasil dari perkembangan dan pembangunan.

Meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat merupakan tujuan pembangunan ekonomi (Damsar, 2009). Dalam hal mewujudkan tujuan dan harapan pembangunan dibutuhkan banyak upaya tanpa adanya bias antara gender, suku, ras, agama, dan golongan. Namun, pada pelaksanaannya upaya-upaya tersebut masih mengabaikan masalah kesetaraan dan keadilan dengan adanya perbedaan antara peran laki-laki dan perempuan sebagai pelaku dan penerima hasil pembangunan. Berkaitan dengan

pembangunan, menurut Sandri, dkk (2014) paradigma yang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dari dimensi pembangunan manusia bukan hanya pendapatan per kapita. Memiliki sumber daya manusia yang berkualitas adalah salah satu kunci dari peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan menjadi salah satu akibat peran perempuan dalam pelaksanaan pembangunan belum dimanfaatkan secara optimal. Ketimpangan gender di Indonesia masih menjadi salah satu masalah yang dapat menghambat pembangunan.

Ketimpangan gender di Indonesia masih tergolong tinggi. Berdasarkan indikator ketimpangan gender yang dipakai secara global yaitu Gender Gap Index (GGI), dalam Global Gender Gap Report yang dikeluarkan oleh World Economic Forum menempatkan Indonesia pada posisi yang cukup rendah yaitu berada pada posisi 87 dari 146 negara dengan perolehan poin sebesar 0,697 pada 2023 dan kembali turun hingga posisi 100 dari 146 negara dengan perolehan poin 0,686 pada 2024. Merujuk pada sumber yang sama, negara-negara dengan posisi tertinggi secara global untuk poin GGI menempatkan beberapa negara dari benua Eropa, sedangkan negara-negara dengan poin GGI terendah rata-rata merupakan negara yang berada di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan. Menurut UNDP dalam Human Development Report (HDR), dalam kategori negara di ASEAN, Indonesia berada di posisi ke-6 untuk nilai IPM dan posisi tersebut tidak berubah sejak tahun dibentuknya indikator IPM yaitu 1990, hingga 2012. Selain itu untuk indeks ketimpangan gender yang juga dikeluarkan oleh UNDP dalam HDR, hingga tahun 2012 Indonesia termasuk tinggi negara dengan indeks ketimpangan gender tertinggi di ASEAN bersama dengan Laos dan Kamboja.

Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak dapat dilihat hanya dari sisi pembangunan ekonominya saja namun juga dari pembangunan manusianya (Ananta et. al, 2023). Untuk mengetahui tingkat pembangunan manusia yang telah dilakukan oleh suatu negara, maka UNDP (*United Nation Development Programme*) pada tahun 1990 telah mengeluarkan suatu indikator yaitu Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Namun, capaian IPM hanya dapat menunjukkan kesenjangan antar wilayah saja dan belum dapat menggambarkan perbedaan capaian kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan partisipasi antara laki-laki dan perempuan harus terus didorong secara maksimal di semua aspek kehidupan agar terjadinya keberhasilan pembangunan. Kesetaraan gender menjadi urgensi dalam seluruh bidang pembangunan yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, hingga politik (Napitupulu, 2022). Sumberdaya manusia yang berkualitas dan merasakan pembangunan yang efektif dan berkeadilan akan mendorong produktivitas masyarakat dalam suatu wilayah yang akan turut mendorong pembangunan (Nursini & Syahrul, 2022).

Laki-laki maupun perempuan memiliki peran yang sama pentingnya untuk diperhatikan agar dapat berkontribusi untuk mencapai pembangunan manusia seutuhnya. Untuk melengkapi perhitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia menurut gender maka dibentuklah indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) (UNDP, 1990). IPG ialah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM laki-laki. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPG dibangun melalui pendekatan 3 dimensi dasar. Pendekatan tersebut sama dengan IPM namun dengan indikator yang sedikit berbeda dengan IPG. Komponen penyusun IPG tidak jauh berbeda dengan IPM yaitu terdiri dari dimensi pendidikan, dimensi kesehatan, dan dimensi ekonomi (Ferrant, 2010). Kesetaraan dan pemberdayaan gender suatu negara diukur dengan menggunakan indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender. Menurut Kementerian PPPA Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender merupakan dua indikator yang sering digunakan dalam analisis capaian pembangunan wilayah berbasis gender.

Salah satu indikator kesejahteraan ekonomi adalah kesetaraan. Kesetaraan mengandung makna bahwa seluruh komponen masyarakat, termasuk perempuan, berhak berpartisipasi dan mengakses peluang untuk berkontribusi dalam peningkatan perekonomian (Arifin et al., 2018). Namun kesenjangan gender seringkali menjadi kendala bagi perempuan untuk berpartisipasi dan

merasakan hasil pembangunan (Lorenza, 2022). Ketimpangan gender dapat disebabkan oleh pola pikir dan budaya masyarakat yang masih tertutup akibat pengaruh norma-norma sosial yang sudah mengakar sehingga perempuan hanya dituntut mampu melakukan pekerjaan rumah tangga tanpa perlu bekerja. Peran perempuan saat ini, tidak hanya sekedar mengurus dapur dan rumah saja, perempuan juga sebagai agen pembangunan mempunyai kesempatan yang sama dalam berkarir dan mengembangkan potensi diri dengan tetap menjalankan tanggung jawab sebagai perempuan.

Pencapaian pembangunan gender di Indonesia di tingkat provinsi memang semakin membaik dari waktu ke waktu sejalan dengan pertumbuhan IPG Indonesia. Namun faktanya per tahun 2023 hanya kurang dari setengah jumlah provinsi di Indonesia yang memiliki skor IPG lebih dari rata-rata Indonesia yaitu sebanyak 15 provinsi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan termasuk pembangunan manusia berbasis gender di Indonesia perlu ditingkatkan hingga ke daerah. Tidak dapat dipungkiri salah satu tantangan utama di Indonesia yang berbentuk negara kepulauan adalah adanya kesenjangan capaian pembangunan antar wilayah yang masih relatif tinggi (Nairobi & Respitasari, 2021).

United Nation Development Programme menyatakan bahwa kesetaraan gender tidak harus berarti laki-laki dan perempuan harus sama, namun dalam hal hak, tanggung jawab, dan kesempatan keduanya tidak boleh diperlakukan berdasarkan gender mereka sebagai laki-laki atau perempuan. Kesempatan yang dimaksud adalah kesempatan perempuan dalam akses kehidupan layak, kesehatan, pendidikan, perekonomian, hingga politik. Di Indonesia, tingkat pendidikan yang umumnya diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah menunjukkan angka yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Pada faktanya rata-rata lama sekolah perempuan Indonesia berada di bawah laki-laki dan juga di bawah rata-rata keseluruhan. Hal tersebut menunjukkan masih banyak penduduk perempuan yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah yang dapat mengakibatkan menurunnya produktivitas perempuan utamanya di dunia pekerjaan profesional (Rahmawati *et al.*, 2021).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rozaini (2023) dan Elisa (2022) dan Rafiqi (2020) bahwa faktor pendidikan berpengaruh terhadap pembangunan gender. Selain itu ketimpangan pendapatan pun masih dirasakan oleh perempuan dalam hal pekerjaan dikarenakan rata-rata upah perempuan yang masih berada di bawah laki-laki (Francine & Laxrence, 2007). Porsi tenaga kerja perempuan yang bekerja di sektor produktif masih lebih sedikit dibandingkan laki-laki yaitu sektor pertambangan, listrik, gas dan air, serta jasa keuangan. Sedangkan perempuan lebih banyak menyumbang tenaga kerja pada sektor yang memiliki upah rata-rata relatif rendah, seperti restoran dan perdagangan. Dalam banyak kasus perempuan juga seringkali dibayar lebih rendah untuk pekerjaan yang sama dibandingkan laki-laki.

Saat ini Indonesia berada dalam kondisi yang menguntungkan yang disebut “bonus demografi” Bonus demografi merupakan kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk usia non produktif. Jumlah penduduk dan struktur kependudukan merupakan salah satu dorongan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi (Elvina & Zebua, 2019). Komposisi penduduk dan struktur umur, dapat menjadi salah satu faktor penentu kesejahteraan suatu negara dalam kondisi tertentu. “Negara dengan konsentrasi penduduk usia kerja yang tinggi memiliki keuntungan dalam menghasilkan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi” (Fleischhauer, 2007). Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia. Jumlah penduduk Indonesia per 31 Januari 2023 mencapai 273,52 juta jiwa dengan perbandingan penduduk laki-laki adalah 50,58% dan penduduk perempuan adalah 49,42%. Menurut Badan Pusat Statistik terdapat 190,98 juta orang atau sekitar 69,25% dari total penduduk berada pada usia kerja produktif. Sumber daya manusia merupakan salah satu modal penting dalam pembangunan (Becker, 2018).

Menurut Badan Pusat Statistik per Februari 2023 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Indonesia hanya sebesar 69,30%. Angka tersebut didapatkan dari total angkatan kerja Indonesia yang berjumlah 146,62 juta orang dibagi dengan total penduduk usia kerja yaitu 211,59 juta orang per Februari 2023.

Angka tersebut sangat ironi mengingat bahwa Indonesia masih memiliki bonus demografi hingga setidaknya 18 tahun mendatang. Melihat fakta bahwa jumlah penduduk perempuan dan laki-laki hampir sama sayangnya tingkat partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan sangat timpang yaitu sebesar 83,98% untuk TPAK laki-laki dan hanya 54,42% untuk TPAK perempuan (Aprilianti & Setiadi, 2020). Demikian pula jumlah laki-laki dan perempuan pada kelompok usia kerja pun memiliki angka perbandingan yang tidak jauh berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang sama pentingnya dengan laki-laki dalam memaksimalkan manfaat bonus demografi dalam mendukung pembangunan. Namun adanya kesenjangan gender di Indonesia menyebabkan Indonesia tidak dapat memaksimalkan manfaat bonus demografi. Hal tersebut dikarenakan perempuan tidak dapat berpartisipasi penuh dalam perekonomian.

Prespektif yang berkembang di kalangan masyarakat adalah ‘perempuan tidak perlu memiliki pendidikan tinggi dan bekerja’ menjadi faktor yang tidak bisa dikesampingkan. Jika perempuan dapat mengambil peran lebih besar dalam perekonomian tentu akan menjadi faktor pendorong percepatan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan berkurangnya angka pengangguran dan ketimpangan pendapatan karena meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ita Evi Lestari *et. al.* (2019), Azizi *et al.* (2021), Sulisto *et al.* (2023) bahwa jumlah pekerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan gender. Namun pada penelitian Suwanda & Nurhayati (2023) jumlah pekerja perempuan dalam kategori pegawai negeri sipil tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan gender.

Masalah ketimpangan gender bukanlah masalah tekanan etika sederhana dan isu sosial melainkan juga tantangan krisis ekonomi (Vidyanagar *et al.*, 2020). Masalah ketimpangan gender terjadi di banyak negara di dunia, utamanya pada negara-negara di benua Afrika dan Asia. Menurut Downes dan Nicol (2020) kesetaraan gender bukan hanya hak asasi fundamental, namun juga merupakan

kunci dari perekonomian modern yang dapat memberikan pertumbuhan inklusif berkelanjutan. Kesenjangan gender tetap ada di semua bidang kehidupan sosial dan ekonomi, namun upaya mempersempit kesenjangan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Hal tersebut menjadi alasan mengapa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan Kesetaraan Gender sebagai salah satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (United Nations, 2015). Kesetaraan gender dan partisipasi aktif perempuan penting untuk tindakan efektif pada semua aspek pembangunan berkelanjutan. Kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu pembangunan yang memiliki nilai tersendiri. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kesenjangan dan menjalankan pemerintahan dengan lebih efektif (Publicuho *et al.*, 2022).

Berbagai kebijakan pembangunan yang ada di Indonesia belum sepenuhnya mampu membebaskan perempuan dari peran gender tradisional yang dilekatkan kepada perempuan. Membangun kesadaran peran gender yang baru dan lebih adil bagi perempuan melalui kebijakan pengarusutamaan gender merupakan sebuah keharusan (Bappenas, 2020). Isu kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia menjadi hal yang sangat penting dan telah menjadi perhatian pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan gender adalah upaya pengintegrasian gender dalam setiap tahapan dan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan, dengan tujuan utama meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021). Guna mendukung tercapainya kesetaraan gender, pemerintah Indonesia menyiapkan berbagai kebijakan yang mengarah pada implementasi pengarusutamaan gender (PUG) atau strategi pembangunan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Keberhasilan program mengentaskan ketimpangan gender dapat dilihat melalui beberapa indikator salah satunya adalah jumlah wanita yang bekerja dan mendapatkan upah layak. Hal ini

karena wanita juga dapat berkontribusi terhadap perekonomian keluarga yang akan berdampak pada kesejahteraan (Vidyanagar *et al.*, 2020).

Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, menginstruksikan semua perangkat daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) untuk memasukkan PUG ke dalam perencanaan dan penganggaran setiap tahun. Berdasarkan Permendagri tersebut, ditegaskan tentang penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan harus responsif gender, baik dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan rencana kerja tahunan (Bappenas, 2020).

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Indonesia diserahkan kepada pemerintahan tiap daerah dengan kebijakan desentralisasi guna mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Desentralisasi di Indonesia yang mulai diterapkan sejak berjalannya reformasi ditandai dengan pemberian otonomi kepada pemerintah daerah. Hal ini diiringi penguatan peran masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan agar program pembangunan yang dilakukan benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Pelaksanaan otonomi membuat suatu daerah berwenang untuk mengelola wilayahnya sendiri (Syahidin *et. al*, 2022).

Dalam prakteknya pembangunan di era otonomi daerah masih belum seluruhnya melibatkan masyarakat dalam perencanaannya. Salah satu dampak proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang tidak mengikutsertakan masyarakat adalah banyaknya anggaran daerah yang tidak responsif terhadap masalah gender. Anggaran yang tidak responsif gender adalah anggaran yang tidak memperhatikan perbedaan terhadap perempuan atau laki-laki, kualitas hidup perempuan dan anak yang rendah serta ketimpangan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki (Puji Astuti, 2016). Dengan adanya perencanaan penganggaran responsif gender, diharapkan bisa menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam hal

mendapatkan akses, manfaat, serta tercapainya partisipasi dalam pengambilan keputusan (Umam et al., 2022). Kaitan antara anggaran daerah, dalam hal ini pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap pembangunan manusia pernah dilakukan oleh Rahmawati, dkk. (2021), Maharda & Aulia, (2020), dan Herianingrum (2021) yang menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan manusia. Sedangkan dalam penelitian Jean & Mongan (2019) dan Kahang, dkk, (2016) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah daerah bidang pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh terhadap pembangunan manusia.

Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu cerminan dari keberhasilan pembangunan dan pengelolaan keuangan pemerintah (Haryanto, 2008). Pengelolaan keuangan yang baik akan meningkatkan pembangunan dalam hal ini IPM dan IPG. Dalam rangka meningkatkan pembangunan manusia, peran pemerintah daerah sangat diperlukan terutama dalam hal mengeluarkan anggaran untuk penyediaan layanan publik seperti sektor pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan data dari DJPK yang digunakan dalam penelitian, diketahui bahwa hanya sebanyak 8 provinsi saja yang memiliki rata-rata pengeluaran daerah dibidang pendidikan dan kesehatan di atas rata-rata pengeluaran nasional bidang pendidikan dan kesehatan.

Namun, kajian mengenai hal ketimpangan gender dan anggaran keuangan daerah untuk gender di Indonesia masih minim, terutama di tingkat regional. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba memberikan kontribusi literatur tidak hanya dengan mengkaji pengaruh ketimpangan gender terhadap pembangunan manusia berbasis gender menggunakan analisis data panel dari 34 provinsi di Indonesia, namun juga dengan melihat bagaimana peran pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan manusia berbasis gender. Ketimpangan gender bukan hanya persoalan moral dan sosial, namun juga menjadi tantangan ekonomi. Pemberdayaan perempuan penting bagi pembangunan ekonomi karena mereka menyumbang hampir setengah dari sumber daya manusia di Indonesia. Jika populasi perempuan, yang hampir separuh penduduk Indonesia,

tidak mencapai potensinya, maka perekonomian akan terpuruk dan sulit mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, pada penelitian ini penulis akan berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan gender dari yang telah di sebutkan sebelumnya yaitu mengenai ketimpangan gender dalam variabel rata-rata lama sekolah, rata-rata upah, tingkat partisipasi angkatan kerja serta pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan gender.

1.2 Rumusan Masalah

1. Ketimpangan gender di Indonesia masih tergolong tinggi, Berdasarkan indikator ketimpangan gender yang dipakai secara global yaitu Gender Gap Index (GGI) dalam Global Gender Gap Report yang dikeluarkan oleh World Economic Forum menempatkan Indonesia pada posisi yang cukup rendah yaitu berada pada posisi 87 dari 146 negara dengan perolehan poin sebesar 0,697 pada 2023 (World Economic Forum, 2023) dan kembali turun hingga posisi 100 dari 146 negara dengan poin 0,686 pada 2024 .(World Economic Forum, 2024).
2. Menurut *United Nation Development Programme* (UNDP) dalam Human Development Report (HDR) dalam kategori negara di ASEAN Indonesia berada di posisi ke 6 untuk nilai IPM dan posisi tersebut tidak berubah dari tahun 1990-2012. Selain itu untuk nilai indeks ketimpangan gender yang juga dikeluarkan oleh UNDP dalam HDR hingga tahun 2012, Indonesia termasuk tiga negara dengan indeks ketimpangan gender tertinggi di ASEAN bersama dengan 2 negara lainnya yaitu Laos dan Kamboja.
3. Di Indonesia, tingkat pendidikan yang umumnya diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah menunjukkan angka yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Pada faktanya rata-rata lama sekolah perempuan Indonesia berada di bawah laki-laki dan juga di bawah rata-rata keseluruhan.

4. Masih banyak penduduk perempuan yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah yang dapat mengakibatkan menurunnya produktivitas perempuan utamanya di dunia pekerjaan professional. Porsi tenaga kerja perempuan yang bekerja di sektor produktif masih lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Sedangkan perempuan lebih banyak menyumbang tenaga kerja pada sektor yang memiliki upah rata-rata relatif rendah,
5. Fakta bahwa jumlah penduduk perempuan dan laki-laki hampir sama, sayangnya tingkat partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan sangat timpang yaitu sebesar 83,98% untuk TPAK laki-laki dan hanya 54,42% untuk TPAK perempuan
6. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik per tahun 2023 hanya kurang dari setengah jumlah provinsi di Indonesia yang memiliki skor IPG lebih dari rata-rata Indonesia yaitu sebanyak 15 provinsi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan termasuk pembangunan manusia berbasis gender di Indonesia perlu ditingkatkan hingga ke daerah.
7. Berdasarkan data dari DJPK yang digunakan dalam penelitian, diketahui bahwa hanya sebanyak 8 provinsi saja yang memiliki rata-rata pengeluaran daerah dibidang pendidikan dan kesehatan di atas rata-rata pengeluaran nasional bidang pendidikan dan kesehatan.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap indeks pembangunan gender di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh rata-rata upah terhadap indeks pembangunan gender di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap indeks pembangunan gender di Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap indeks pembangunan gender di Indonesia.
5. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap indeks pembangunan gender di Indonesia.

6. Menganalisis pengaruh rata-rata lama sekolah, rata-rata upah, tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan, serta pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan gender di Indonesia secara simultan.
7. Mengetahui perbedaan pengaruh rata-rata lama sekolah, rata-rata upah, tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan serta pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan gender di Indonesia antara kelompok laki-laki dan kelompok perempuan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan dan bukti empiris untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh gender gap dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap pembangunan manusia berbasis gender di Indonesia.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi atau bahan pertimbangan oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan dan lembaga lain yang berwenang dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan pembangunan manusia dan mempersempit adanya ketimpangan antar gender dalam proses pembangunan

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Gender

Konsep gender berbeda dengan konsep *sex* atau jenis kelamin, karena *sex* adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dicirikan oleh faktor biologis yang merupakan kodrat yang diberikan oleh Tuhan. Sedangkan gender merupakan karakter yang ada melalui proses sosialisasi oleh budaya dan nilai-nilai sosial di masyarakat terhadap perbedaan jenis kelamin. Struktur tersebut yang kemudian menghasilkan perbedaan peran gender, yang tidak bersifat universal, tetapi dapat berbeda di masing-masing budaya (Reevess, 2000). Gender merupakan hasil konstruksi budaya dan sosial tentang peran, tanggungjawab, dan relasi berbeda antara perempuan dan laki-laki. Dalam realitasnya jenis kelamin tidak pernah dipertanyakan dan dipersoalkan, berbeda dengan gender yang selalu diperdebatkan. Hal ini sebab gender hadir dengan beragam pemaknaan. Misalkan gender sebagai konsep, gerakan sosial, kesadaran sosial, pun sebagai permasalahan sosial.

Gender merupakan berbagai ciri serta perilaku yang diidentifikasi kepada perempuan dan laki-laki berdasarkan konstruksi budaya. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan ditafsirkan oleh kebudayaan menjadi seperangkat tuntutan sosial dalam hal kepantasan dalam berperilaku berdasarkan jenis kelamin. Hal tersebut kemudian melahirkan ketidakadilan gender dalam berbagai bentuk seperti marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan dan beban kerja ganda (Lorber & Park, 2010). Namun, peran gender yang ada di setiap negara tidaklah sama. Hal ini bersifat lokal, tergantung dari budaya serta perkembangan masyarakatnya. Di Indonesia berbagai kebijakan pemerintah dijalankan guna mengurangi adanya bias gender di antaranya, pembangunan berlandaskan pengarusutamaan gender dan penganggaran responsif gender.

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan isu gender menjadi satu mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam kebijakan dan program pembangunan nasional. Konsep pengarusutamaan gender (PUG) pertama kali muncul saat Konferensi PBB untuk Perempuan ke-4 di Beijing tahun 1995. Setelahnya, PUG ditetapkan sebagai strategi yang wajib untuk dilaksanakan oleh PBB dan pemerintah di negara anggotanya (Sundari, 2008). Tujuan PUG di antaranya adalah untuk memberikan perhatian terhadap kelompok yang terpinggirkan karena dampak bias gender, memastikan akses bagi laki-laki dan perempuan, kontrol dan partisipasi yang sama, serta meningkatkan kepekaan gender terhadap berbagai pihak (Rahayu, 2017).

2.1.2 Peran Pemerintah

Peran (*role*) ialah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh individu atau organisasi. Peran erat kaitannya dengan kedudukan atau status yang dalam kehidupan masyarakat. Kedudukan merupakan suatu wadah yang berisikan hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Menurut Soekanto (2002) peranan adalah aspek dinamis kedudukan atau status. Jika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia disebut telah menjalankan peran.

Syarat-syarat peran menurut Soekanto (2002) mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat.
2. Peran adalah sebuah konsep perilaku mengenai apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran pemerintah ialah suatu upaya yang secara sadar dilakukan oleh suatu pemerintah, bangsa, dan negara, dalam rangka mencapai tujuan nasional melalui perubahan dan pertumbuhan yang terencana. Peran pemerintah menurut Musgrave (1984) ada 3 (tiga) yaitu:

1. Peran alokasi, merupakan peran pemerintah yang mengusahakan bagaimana agar alokasi sumber-sumber ekonomi dapat terlaksana secara efisien. Hal tersebut karena sistem pasar yang tidak mungkin dapat menyediakan semua kebutuhan masyarakat maka diperlukan peranan pemerintah di dalamnya.
2. Peran distribusi, yaitu pemerintah sebagai alat distribusi kekayaan dan pendapatan dengan cara menyeimbangkan antara efisiensi dan pemerataan alokasi sumber daya. Peran distribusi di antaranya dilakukan dengan menggunakan instrument pajak, jaminan sosial dan pelayanan publik.
3. Peran stabilisasi, yaitu tugas dan wewenang pemerintah yang berkaitan dengan bagaimana cara pemerintah untuk dapat menciptakan dan menjaga stabilitas ekonomi suatu negara melalui regulasi dan kebijakan yang dijalankan.

Fungsi pemerintah untuk pemberdayaan dan pemerataan yaitu peran untuk mengarahkan masyarakat dan pembangunan demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan. Peran pemerintah yang menurut Aridhayandi (2018) yaitu:

a. Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk penyelenggaraan pembangunan melalui regulasi dan kebijakan. Pemerintah memberikan acuan kepada masyarakat untuk mengatur segala kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan.

b. Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator ialah menggerakkan masyarakat apabila terjadi hambatan dan kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan menjaga keberlangsungan dinamika pembangunan daerah yang diharapkan.

c. Pemerintah sebagai Fasilitator

Pemerintah sebagai fasilitator ialah peran pemerintah untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan pembangunan guna memaksimalkan pembangunan daerah.

Anggaran Responsif Gender (ARG)

Instrumen penting untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender adalah kebijakan anggaran yang responsif gender. Anggaran merupakan alat kebijakan yang paling penting bagi pemerintah, karena tanpa dana anggaran maka pemerintah tidak akan berhasil melaksanakan dan merealisasikan berbagai kebijakan yang direncanakan (Kementerian PPPA, 2010). Anggaran Responsif Gender (*Gender Responsive Budget*) menjadi isu global karena fakta masih banyaknya diskriminasi gender, terutama terhadap perempuan. Lingkaran diskriminasi yang dialami perempuan bisa dialami perempuan sejak masih dalam kandungan, bahkan ketika telah menjadi seorang isteri. Hal ini tentu membutuhkan perhatian dan solusi dari pemerintah melalui intervensi anggaran agar perempuan lebih memperoleh akses untuk terlibat dalam proses pembangunan dan dalam menerima manfaat dari hasil pembangunan (Khotimah, 2009).

Anggaran Responsif Gender pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang mengintegrasikan perspektif gender dalam semua tahapan proses penganggaran, yang menjamin bahwa kebijakan anggaran benar-benar memperhatikan isu-isu gender dalam masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung mendiskriminasi baik terhadap laki-laki maupun perempuan (Kurniawan & Fridiyanti, 2023).

Untuk melihat dampak pengalokasian anggaran terhadap kesetaraan gender, dilakukan pengujian terhadap pengeluaran yang dapat meningkatkan kesetaraan gender atau lebih dikenal sebagai Analisis Anggaran Gender. Analisis Anggaran Gender memang bukan satu-satunya cara untuk merubah prioritas anggaran dan proses pengambilan keputusan yang benar-benar meningkatkan kesetaraan gender. Meningkatnya anggaran pendidikan yang memberikan kesempatan pendidikan bagi anak perempuan secara signifikan berpengaruh pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi (Reina, 2010).

Terdapat beberapa alasan mengapa hampir di semua negara Anggaran Responsif Gender lebih fokus kepada perempuan yaitu: karena hampir 2/3 orang yang buta huruf adalah perempuan; di Negara berkembang banyak perempuan yang

meninggal pada usia produktif karena melahirkan; perempuan belum terwakili secara memadai dalam proses pengambilan keputusan baik di sektor pemerintah maupun di sektor bisnis; perempuan memperoleh gaji yang lebih rendah dari laki-laki untuk pekerjaan yang sama; dan perempuan terus lebih banyak yang berlutut dalam pekerjaan-pekerjaan yang tidak berupah (Umam et al., 2022). Dalam konteks penghapusan diskriminasi gender, maka menurut Sundari (2008) anggaran responsif gender adalah alat untuk menjamin hal-hal berikut :

- a. Prioritas bagi perempuan miskin yang terlihat pada alokasi anggaran.
- b. Pelaku kebijakan, organisasi, system dan proses yang lebih mencerminkan kepentingan perempuan miskin dan juga menyediakan ruang bagi suara perempuan, juga transparansi dan akuntabilitas terkait komitmen gender.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak prinsip-prinsip ARG antara lain:

- a. ARG pada penganggaran diletakan pada output kegiatan
- b. ARG yang diterapkan untuk menghasilkan output kegiatan yaitu :
 - (i) Penugasan prioritas pembangunan nasional dan daerah, (ii) Pelayanan kepada masyarakat, dan (iii) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG).
- c. ARG bukan berfokus pada seberapa besar penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk PUG, tetapi bagaimana anggaran keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil untuk laki-laki dan perempuan.

Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan seperangkat cara yang dilakukan untuk menggabungkan sudut pandang gender ke dalam prosedur perencanaan dan penganggaran. Tujuan PPRG ialah mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Penyusunan PPRG merupakan sebuah alat analisis atau kerangka kerja dalam rangka mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tujuan dari PPRG yaitu:

1. Peningkatan kesadaran urgennya isu gender dalam pembangunan bagi para pengambil keputusan.
2. Membantu mewujudkan keadilan untuk kesejahteraan gender.

3. Menciptakan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel serta membantu peningkatan efektifitas dan efisiensi anggaran.
4. Pengurangan terhadap adanya ketimpangan dan diskriminasi gender khususnya perempuan dalam pembangunan.
5. Mewujudkan peningkatan partisipasi dari masyarakat.
6. Menjamin supaya kebutuhan dan aspirasi gender dari berbagai kelompok sosial bisa diakomodasikan ke dalam pengeluaran atau belanja daerah.

Berikut adalah langkah-langkah penyusunan PPRG di Daerah berdasarkan Pedoman Teknis PPRG Bagi Daerah (Kementerian PPPA, 2010):

1. Memilih kebijakan/program/kegiatan yang akan dianalisis
2. Menyajikan data pembuka yang terpilah menurut jenis kelamin. Data bisa berupa data kuantitatif atau data kualitatif
3. Mengenali faktor kesenjangan gender
4. Menemukan sebab kesenjangan internal dan eksternal
5. Merumuskan kembali tujuan kebijakan/program agar responsive gender
6. Menetapkan rencana aksi mengatasi kesenjangan gender
7. Menetapkan data dasar untuk mengukur kemajuan terkait tujuan dan output kegiatan berdasarkan data pembuka terpilah sebelumnya
8. Menetapkan indikator gender sebagai pengukuran hasil melalui ukuran kuantitatif maupun kualitatif

Secara umum penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia belum mengembangkan anggaran yang berperspektif gender. Akibatnya banyak kebijakan masih bias gender yang menyebabkan dampak pembangunan tidak memberikan manfaat yang setara antara laki-laki dan perempuan. Hal ini terjadi karena pembangunan belum benar-benar ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperhatikan kesenjangan gender yang terjadi di masyarakat (Mundayat, 2006).

2.1.3 Rata-Rata Lama Sekolah

Menurut Badan Pusat Statistik, rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang telah digunakan atau dilewati oleh penduduk untuk menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa kondisi normal rata-rata lama sekolah pada suatu wilayah

adalah tidak akan menurun. Cakupan penduduk yang akan dihitung dalam perhitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas baik laki-laki maupun perempuan. Angka ini juga dihitung dengan menggunakan 3 variabel simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat atau kelas yang sedang atau pernah dijalani, dan ijazah terakhir yang dimiliki.

Berbeda dengan sektor tradisional, probabilitas keberhasilan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor modern adalah adanya pendidikan. Biaya pendidikan langsung maupun tidak langsung yang harus ditanggung oleh individu atau keluarga, merupakan faktor penentu lamanya pendidikan seseorang. Variabel lain yang sangat berpengaruh terhadap tingkat pendidikan seseorang adalah budaya, gender, status sosial, pendidikan orang tua, serta besarnya anggota keluarga atau beban ketergantungan dan kemiskinan.

2.1.4 Rata-Rata Upah

Menurut Badan Pusat Statistik, upah rata-rata merupakan imbalan atau penghasilan rata-rata per jam kerja yang diperoleh pekerja baik berupa uang maupun barang. Besaran upah dapat menggambarkan kualitas pekerjaan dan kondisi kehidupan seseorang. Upah rata-rata per jam kerja yang biasanya dibedakan menurut jenis kelamin, jabatan, dan status disabilitas menggambarkan kesenjangan upah yang terjadi antar kelompok tersebut. Kesenjangan upah terjadi ketika ada dua orang dalam satu perusahaan yang melakukan pekerjaan yang sama pada tingkat kualifikasi/jabatan yang sama akan tetapi memperoleh bayaran berbeda.

Kesenjangan upah untuk pekerjaan yang sama mungkin terjadi dalam suatu tim atau departemen, perusahaan, dan cabang industri. Pekerjaan yang sama biasanya dibandingkan dalam hal kualifikasi yang dibutuhkan pada suatu bidang tertentu. Jadi sudah seharusnya laki-laki dan perempuan yang melakukan pekerjaan yang sama, dihargai dan diperlakukan dengan setara juga menerima upah yang sama. Namun pada faktanya pekerja perempuan di banyak negara rata-rata memiliki upah per jam jauh di bawah pekerja laki-laki. Perbedaan upah ini bervariasi sebanyak 10-40% dibandingkan rata-rata dari seluruh penduduk yang bekerja berdasarkan gender. Pada praktiknya perempuan tampaknya lebih sulit untuk

mendapatkan upah lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki dikarenakan adanya perbedaan biologis yang menyebabkan perempuan tidak dapat melakukan beberapa pekerjaan yang sama seperti laki-laki.

2.1.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Pekerja atau tenaga kerja adalah semua orang yang bekerja, baik itu di perusahaan maupun lembaga, instansi pemerintahan. Maupun institusi informal. Menurut Sukirno (2006) angkatan kerja didefinisikan sebagai jumlah pekerja atau tenaga kerja yang ada dalam lingkup perekonomian dalam kurun waktu tertentu. Angkatan kerja kemudian digolongkan menjadi kelompok sedang bekerja dan kelompok sedang menganggur namun sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja biasanya dijelaskan dengan angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tenaga kerja sendiri dapat dikelompokkan menurut jenis pekerjaan, lapangan pekerjaan, dan status pekerjaan. Namun jika dilihat dari segi keahlian dan pendidikannya, tenaga kerja biasa dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

- a. Tenaga kerja kasar adalah tenaga kerja yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah dan tidak memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang pekerjaan.
- b. Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dari pelatihan atau pengalaman kerja tertentu.
- c. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki pendidikan yang cukup tinggi dan ahli dalam suatu bidang tertentu.

Menurut Johansson (2002) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masuk dalam usia kerja yang bekerja atau menganggur dengan jumlah penduduk yang bekerja. Saat nilai TPAK turun, hal tersebut menandakan bahwa ketersediaan penduduk usia kerja yang dapat kerja lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk usia kerja dan biasanya dinyatakan dalam persen. Partisipasi angkatan kerja dapat diukur dengan TPAK yang berfungsi mengetahui besarnya persentase penduduk usia kerja (usia 15-64 tahun) yang berpotensi untuk aktif menjadi tenaga kerja di suatu negara. Nilai TPAK yang tinggi menggambarkan tingginya penduduk angkatan kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi dan pengangguran yang semakin sedikit.

2.1.6 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah sejumlah uang atau dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai kegiatan dan program dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan dan menyediakan barang-barang publik serta pelayanan kepada masyarakat (Sukirno, 2006). Pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah atau wilayah (Ambya, 2020).

Pembangunan sumber daya manusia dapat diwujudkan melalui realisasi belanja negara dalam pelayanan publik. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Kuncoro, 2013).

1. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan

Pengeluaran pemerintah pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20% merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan. Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan, maka dari itu pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4, menjelaskan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Hal ini berarti bahwa pendidikan sangatlah penting dalam pembangunan suatu negara. Selain itu, tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 yang mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Implikasi dari pembangunan pendidikan adalah kehidupan manusia akan semakin berkualitas (Dewi, 2019). Dalam kaitannya dengan perekonomian secara umum (nasional) semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut. Semakin tinggi kualitas hidup atau investasi sumber daya manusia yang mempunyai kualitas tinggi akan berimplikasi juga terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.

Manfaat dari adanya pendidikan sebagai investasi pada sumber daya manusia bagi pembangunan ekonomi suatu bangsa secara umum diantaranya:

1. Dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif, karena adanya peningkatan pengetahuan dan keahlian.
2. Tersedianya kesempatan kerja yang lebih luas.
3. Terciptanya suatu kelompok pemimpin yang terdidik guna mengisi jabatan-jabatan penting dalam dunia usaha maupun pemerintahan.
4. Tersedianya berbagai macam program pendidikan dan pelatihan yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan dalam keahlian dan mengurangi angka buta huruf.

2. Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan

Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan merupakan pengeluaran yang dialokasikan khusus untuk bidang kesehatan. Pemerintah melaksanakan tanggungjawabnya dalam bidang kesehatan dengan memfasilitasi lembaga kesehatan menggunakan anggaran kesehatan. Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 171 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat di alokasikan minimal 5% (lima persen) dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% dari APBD di

luar gaji. Hal ini tentunya menjadi tanggungjawab pemerintah di bidang kesehatan sebagai penyedia layanan publik. Layanan publik di bidang kesehatan ini berhak diperoleh oleh setiap masyarakat Indonesia secara adil guna memperoleh tingkat kesejahteraan yang setinggi-tingginya. Prioritas kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jika melihat mutu manusia dari sisi kesehatan, dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia ataupun dapat mempengaruhi kualitas manusia. Banyak masyarakat yang kekurangan gizi, kalori, atau rendahnya kesehatan bagi masyarakat tentunya akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang.

Oleh karena itu, diperlukan anggaran khusus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui pengeluaran pemerintah (Prasetio, 2018). Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara dalam tujuan pembangunan ekonomi. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Terkait dengan teori *human capital* bahwa modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan tingkat kesehatan masyarakat, perlu adanya anggaran yang menjadi pengeluaran bagi suatu kota melalui pemungutan pajak bagi masyarakat. Pemilihan jenis pajak menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak. Fluktuasi kepatuhan pajak akan mempengaruhi perolehan penerimaan pajak dan selanjutnya akan berdampak pada pengeluaran pemerintah daerah yang pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi (Dewi, 2019).

2.1.7 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan manusia digunakan sebagai indikator untuk mengukur kualitas sumber daya manusia guna mencapai taraf kesejahteraan dalam perencanaan pembangunan yang diharapkan. Perencanaan pembangunan manusia yang dilakukan suatu daerah memerlukan dukungan dari pemerintah pusat. Dukungan tersebut dapat berupa alokasi anggaran di sektor-sektor yang menunjang pembangunan manusia. IPM dapat digunakan sebagai instrumen dalam pengalokasian anggaran pembangunan di bidang yang berkaitan dengan

fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan dari anggaran pembangunan adalah pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas hidup masyarakat akan mendorong peningkatan IPM suatu daerah.

Indeks pembangunan gender merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan antara capaian indeks pembangunan manusia (IPM) laki-laki dan indeks pembangunan manusia (IPM) perempuan. Indeks pembangunan gender bertujuan untuk mengukur pertumbuhan manusia seperti indeks pembangunan manusia, hanya saja lebih ditekankan perbandingan antara wanita dan laki-laki (Rahmawati et al., 2021). Perbedaan antara IPG dan IPM dapat dilihat dari upaya untuk mengungkapkan ketimpangan gender dalam pembangunan. IPG menjelaskan kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, sedangkan IPM mengukur capaian pembangunan manusia di seluruh wilayah. Terdapat beberapa dimensi dasar yang sama antara indeks pembangunan gender (IPG) dan indeks pembangunan manusia (IPM) yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Jika angka IPG semakin mendekati 100 maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Pemaknaan sebaliknya, ketika nilai IPG semakin menjauhi angka 100 maka semakin besar kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan (Rozaini, 2023).

Indikator kesenjangan gender yang di pakai secara global, sedikit berbeda dengan yang dipakai di Indonesia. Di mana Indonesia menggunakan Indeks Pembangunan Gender sebagai pengukuran keberhasilan mengentaskan ketimpangan gender yang menggunakan indikator yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia, yaitu dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sedangkan ukuran kesenjangan gender yang digunakan secara global yang dikeluarkan oleh World Economic Forum yaitu Gender Gap Index, memuat indikator tambahan selain dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi, yaitu partisipasi politik. Jika angka batas IPG adalah 100, maka berbeda dengan GGI yang memiliki angka batas 1 untuk batas pengukurannya. Sehingga jika hasil perhitungan GGI suatu negara semakin mendekati angka 1 maka kesenjangan gender yang ada semakin sempit.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori *Human Capital*

Todaro dalam bukunya *Economic Development* menyebutkan mengenai *The New Growth Theory* yang menekankan pentingnya peran pemerintah untuk meningkatkan modal manusia dan pengembangan dalam meningkatkan produktivitas manusia. *Human capital* merupakan sumber dasar bagi produktivitas ekonomi. Investasi modal manusia dilakukan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Semakin banyak jumlah manusia atau tenaga kerja yang sehat dan berpendidikan maka produktivitas akan meningkat. Tentunya kuantitas modal manusia harus berjalan beriringan dengan kualitas untuk mencapai target pembangunan.

Romer (1990) menyatakan bahwa *human capital* merupakan sumber mendasar untuk produktivitas ekonomi. Schultz (1961) menyatakan bahwa *human capital* merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan produktivitas ekonomi di suatu negara. *Human capital* merupakan sebuah konsep yang muncul pertama kali pada tahun 1776 di bidang ekonomi klasik. Ekonom Becker (2018) turut berkontribusi terhadap teori *human capital*, menurutnya modal manusia penting untuk penjelasan kesenjangan gender dalam pendapatan. Menurutnya perempuan memiliki kesempatan lebih banyak dibandingkan laki-laki untuk melakukan pekerjaan sektor informal karena biasanya perempuan mengundurkan diri dari pekerjaan formal untuk sementara waktu atau permanen setelah memiliki anak.

2.2.2 Teori Pembangunan Manusia

Selama ini, untuk mengukur pembangunan biasanya menggunakan PDB dan PDRB, tetapi pengukuran ini hanya dapat mewakili pembangunan dari sisi ekonomi saja. Oleh karena itu, diperlukan sebuah parameter yang dapat menggambarkan aspek sosial dan kesejahteraan manusia sebagai indikator yang juga tak luput dari pembangunan. Selain kemajuan dalam bidang ekonomi, diperlukan pula kemajuan dalam bidang pembangunan manusia yang dapat turut mendorong sebuah kemajuan dari proses pembangunan. Pembangunan manusia menjadi bagian penting dari adanya proses pembangunan (Todaro & Smith, 2006).

Human Development Theory atau Teori Pembangunan Manusia adalah sebuah proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi manusia (United Nation Development Program (UNDP), 1990). Menurut UNDP, pendapatan rata-rata tidak bisa menggambarkan kondisi sumber daya manusia di suatu wilayah sehingga dibuat sebuah konsep untuk mengukur pembangunan manusia yaitu *Human Development Index*. Komponen pengukuran dalam konsep HDI antara lain indeks kesehatan, indeks hidup layak atau ekonomi, dan indeks pendidikan.

Konsep pembangunan manusia adalah sebuah konsep yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik secara mental, fisik, maupun spiritual. Pembangunan sumber daya manusia juga diharapkan sebagai faktor utama dalam proses pembangunan berkelanjutan. Dengan meningkatnya kreativitas dan produktivitas masyarakat, maka diharapkan masyarakat akan dapat mengelola sumberdaya yang ada untuk meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi suatu wilayah meningkat dan stabil maka akan turut meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kecepatan pembangunan juga menjadi indikator keberhasilan pembangunan suatu negara (Todaro & Smith, 2006).

2.2.3 Teori Ketimpangan Gender

- Teori Nature dan Nurture

Teori Nature menyatakan bahwa perbedaan yang ada di antara perempuan dan laki-laki adalah suatu kodrat. Hal tersebut karena adanya perbedaan biologis pada perempuan dan laki-laki yang dijadikan penanda bahwa keduanya memiliki peran dan tugas yang berbeda. Sedangkan teori nurture mengatakan bahwa perbedaan di antara perempuan dan laki-laki muncul karena adanya konstruksi sosial dan budaya (Mosse, 2003). Hal tersebut yang kemudian akan melahirkan perbedaan peran dan tugas. Perbedaan tersebut menjadi penyebab dari perempuan sering mengalami ketertinggalan dan perannya terabaikan baik dalam masyarakat maupun bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki pada suatu kelas yang berbeda, yaitu laki-laki dengan kelas *bourgeois* serta perempuan identik dengan kelas *proletar*.

- Teori Sosial-Konflik

Dalam masalah gender, teori sosial-konflik terkadang diidentikkan dengan teori determinisme ekonomi Marx, yang mengemukakan bahwa perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan oleh perbedaan biologis tetapi merupakan bagian dari penindasan kelas. Dengan kata lain ketimpangan gender bukan bersifat kondrati melainkan karena konstruksi masyarakat. Teori sosial-konflik ini mendapat kritik dari sejumlah pakar terutama karena teori ini menekankan faktor ekonomi dan akumulasi modal sebagai basis ketidakadilan yang kemudian memunculkan konflik.

- Teori Struktural Fungsional

Teori ini menerangkan tentang bagaimana masyarakat sebagai suatu sistem memiliki keterkaitan. Pendekatan structural fungsional adalah teori sosiologi yang diterapkan dalam melihat institusi keluarga. Teori ini berawal dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri dari beberapa bagian yang saling memengaruhi. Teori ini mengakui adanya segala keragaman di dalam kehidupan sosial. Perihal gender, teori ini menunjuk masyarakat pra-industri yang terintergrasi dalam sistem sosial dimana laki-laki diharapkan untuk banyak berada di luar rumah sedangkan perempuan cenderung terbatas di sekitar rumah. Teori ini pula membenarkan adanya praktik yang selalu mengaitkan antara peran sosial dan jenis kelamin.

- Teori Feminisme Marxis-Sosialis

Teori ini bertujuan mengadakan restrukturasi masyarakat agar tercapai kesetaraan gender. Menurut teori ini ketimpangan gender disebabkan karena sistem kapitalisme yang menimbulkan kelas-kelas dan level dalam masyarakat.

2.2.4 Teori Pengeluaran Pemerintah

Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh Rostow dan Musgrave. Model ini menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibagi menjadi 3 tahap. Pada tahap awal perkembangan ekonomi yaitu persentase investasi pemerintah terhadap total investasi menjadi besar. Hal ini karena, pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya guna mendukung perkembangan ekonomi.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi yaitu investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Pada tahap lanjut yaitu perkembangan ekonomi dan aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan program pelayanan kesehatan masyarakat (Mangkoesebroto, 2018). Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijaksanaan fiskal yang bertujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi dengan tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi. (Kahang, dkk. 2016)

2.3 Tinjauan Empiris

Penulis/Judul/Tahun	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Hosiana Febby Yolanda, Noni Rozaini	- Indeks Pembangunan Gender (IPG)	- Analisis data dalam metode ini bersifat kuantitatif	Berdasarkan hasil Uji f, ketiga variabel yang digunakan berpengaruh signifikan terhadap IPG secara simultan.
Analisis Faktor-Faktor Indeks Pembangunan Gender di Provinsi-Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2011-2021 (2023)	- Angka Harapan Hidup - Pengeluaran Per Kapita - Rata-Rata Lama Sekolah	- Data yang digunakan adalah data sekunder tahun 2011-2021 yang bersumber dari BPS. - Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel - Alat analisis yang digunakan adalah eviews 9 dengan model terpilih yang digunakan adalah FEM (<i>fixed effect model</i>)	Sedangkan berdasarkan hasil uji t, variabel AHH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPG, variabel PPK dan RLS berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPG secara spasial.
Ira Elisa, Helma	- Indeks Pembangunan Gender (IPG)	- Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kuantitatif menggunakan analisis regresi data panel.	Berdasarkan hasil Uji F, nilai Prob. lebih kecil dari taraf signifikansi 5% sehingga seluruh variabel penelitian memiliki pengaruh signifikan terhadap
Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sumatera Barat Menggunakan	- Harapan Lama Sekolah - Rata-Rata	- Data yang digunakan	

<p>Analisis Regresi Data Panel (2022)</p>	<p>Lama Sekolah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Penduduk Mengalami Keluhan Kesehatan - TPAK - Pengeluaran per kapita 	<p>adalah data sekunder tahun 2017-2020 yang bersumber dari BPS Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>- Model terpilih yang digunakan adalah FEM (<i>fixed effect model</i>) dengan menggunakan alat analisis SPSS</p>	<p>IPG secara simultan. Hasil Uji t menunjukkan bahwa hanya variabel RLS, HLS, dan TPAK yang memiliki pengaruh signifikan terhadap IPG secara parsial, sedangkan PMKK dan PPK tidak signifikan terhadap IPG</p>
<p>Farida Rahmawati, Afrilia Nur Aini, Elmira Mufliha</p> <p>Analysis of The Gender Development Index in East Java Regency/City in 2017-2019 (2021)</p>	<p>- Indeks Pembangunan Gender (IPG)</p> <p>- Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan</p> <p>- Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>- Kemiskinan</p> <p>- TPAK</p>	<p>- Analisis data dalam metode ini bersifat kuantitatif atau menggunakan statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan..</p> <p>- Data yang digunakan adalah data sekunder tahun 2017-2019 yang bersumber dari BPS Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Keuangan.</p> <p>- Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan ialah regresi data panel</p> <p>- Alat analisis yang digunakan adalah views dengan model terpilih yang digunakan adalah FEM (<i>fixed effect model</i>)</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa variabel PPSPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPG, variabel PE dan KMN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPG, sedangkan variabel TPAK memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPG secara spasial.</p>
<p>Ita Evi Lestari, Sudati Nur Sarfiah, Gentur Jalunggono</p> <p>Analisis Faktor-</p>	<p>- Indeks Pembangunan Gender</p> <p>- Angka Harapan</p>	<p>- Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif,</p>	<p>Hasil penelitian yaitu variabel TPAK, Rata-Rata Lama Sekolah, AHH berpengaruh positif dan signifikan</p>

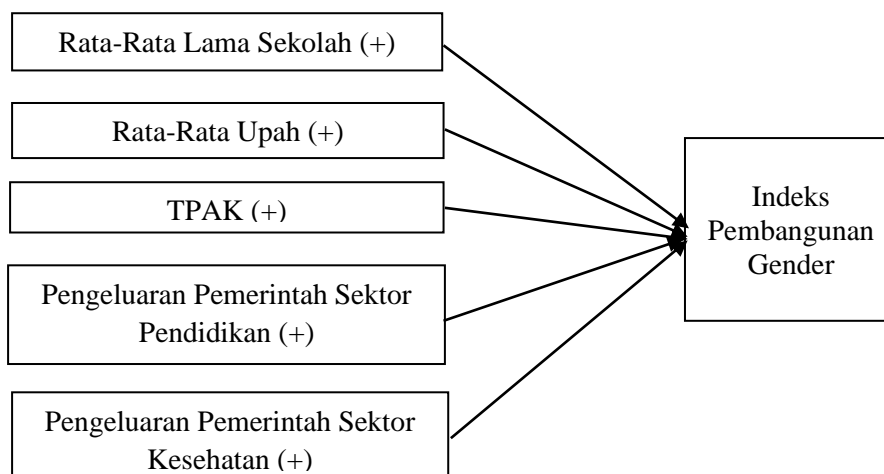
<p>Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Gender di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2019 (2021)</p>	<p>Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rata-Rata Lama Sekolah - TPAK - Persentase Penduduk Yang Memiliki Keluhan Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. - Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. - Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel dengan model FEM (<i>fixed effect model</i>) sebagai model yang dipilih. 	<p>terhadap IPG sedangkan variabel Persentase Masyarakat Yang Memiliki Keluhan Kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Gender.</p>
<p>Johan Beni Maharda, Bunga Zharfa Aulia Government Expenditure And Human Development In Indonesia (2020)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Pembangunan Manusia - Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan - Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan - PDRB Per Kapita - Total Pengeluaran Rumah Tangga Pada Pendidikan dan Kesehatan - Jumlah Angkatan Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data panel Ordinary Least Squares (OLS) - Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari BPS, DJPK, dan Database Riset Kebijakan dan Ekonomi Indonesia (Bank Dunia). 	<p>Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, PDRB Per Kapita, Total Pengeluaran RT pada Pendidikan dan Kesehatan serta Jumlah Angkatan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Sedangkan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM</p>
<p>Jehuda Jean Sanny Mongan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini menggunakan 	<p>Hasil penelitian ini adalah bahwa belanja</p>

<p>Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia (2019)</p>	<p>Manusia</p> <p>- Belanja Pemerintah Pusat Bidang Pendidikan</p> <p>-Belanja Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan</p> <p>- Belanja Pemerintah Pusat Bidang Kesehatan</p> <p>-Belanja Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan</p>	<p>pendekatan kuantitatif.</p> <p>- Data yang digunakan adalah data 32 Provinsi Indonesia dengan tahun penelitian 2010-2016</p> <p>- Metode analisis data panel dengan pendekatan regresi kuadratik, menggunakan metode <i>Random Effect Model</i> (REM)</p>	<p>pemerintah pusat bidang pendidikan tidak berpengaruh terhadap IPM, sedangkan belanja pemerintah pusat bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Di sisi lain, belanja pemerintah daerah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan belanja pemerintah daerah bidang kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM.</p>
<p>Sri Herianingrum, Muhammad Nafik, Qudsi Fauzi, Fairuz Ulfa Afifa, Nisful Laila.</p> <p>The Effect of Government Expenditure On Islamic Human Development Index (2019)</p>	<p>- Indeks Pembangunan Manusia (Beragama Islam)</p> <p>- Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan</p> <p>- Jumlah Pengangguran</p>	<p>- Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel dengan model <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)</p> <p>- Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari BPS, DJPK dan Kementerian Keuangan.</p> <p>-</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang digunakan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap IPMI. Hasil dari uji parsial yaitu bahwa variabel Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPMI. Sedangkan variabel jumlah pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPMI.</p>

2.4 Kerangka Pemikiran

Pembangunan yang diharapkan pada sebuah wilayah atau negara adalah pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Pembangunan bukan hanya pada perekonomian dan infrastruktur namun juga soal kualitas sumber daya manusianya. Pembangunan manusia seharusnya tidak bias gender untuk turut mempercepat pembangunan. Konsep pengarusutamaan gender (PUG) pertama kali muncul saat Konferensi PBB untuk Perempuan ke-4 di Beijing tahun 1995. Menindaklanjuti hal tersebut kemudian dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam pembangunan nasional dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di Daerah. sebagai bukti keseriusan pemerintah mendorong kesetaraan gender. Kemudian PBB pada tahun 2015 mengeluarkan sebuah tujuan besar dengan rincian 17 tujuan yang disebut Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Penelitian ini akan berfokus pada tujuan No.5 yaitu Kesetaraan Gender. Di Indonesia untuk menghitung pembangunan manusia berbasis gender digunakan Indeks Pembangunan Gender yang dimesinya sama dengan IPM yaitu dimensi pengetahuan, dimensi hidup layak, dan dimensi umur panjang hanya saja dibedakan antara laki-laki dan perempuan (Kementerian PPPA, 2010).

Terkait variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 indikator untuk mewakili variabel yaitu ketimpangan gender, pengeluaran pemerintah, dan pembangunan manusia berbasis gender. Dalam indikator ketimpangan gender digunakan rata-rata lama sekolah, rata-rata upah, dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Dalam indikator pengeluaran pemerintah digunakan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan. Terakhir dalam indikator pembangunan manusia berbasis gender sebagai variabel dependen penelitian digunakan indeks pembangunan gender.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan serta dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, maka penulis menggunakan hipotesis berikut:

1. H_0 : Tidak ada pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah Laki-Laki dan Perempuan terhadap Indeks Pembangunan Gender di Indonesia Tahun 2013-2022.
 H_a : Terdapat pengaruh positif Rata-Rata Lama Sekolah Laki-Laki dan Perempuan terhadap Indeks Pembangunan Gender di Indonesia Tahun 2013-2022
2. H_0 : Tidak ada pengaruh Rata-Rata Upah Laki-Laki dan Perempuan terhadap Indeks Pembangunan Gender di Indonesia Tahun 2013-2022.
 H_a : Terdapat pengaruh positif Rata-Rata Upah Laki-Laki dan Perempuan terhadap Indeks Pembangunan Gender di Indonesia Tahun 2013-2022.
3. H_0 : Tidak ada pengaruh TPAK Laki-Laki dan Perempuan terhadap Indeks Pembangunan Gender di Indonesia Tahun 2013-2022.
 H_a : Terdapat pengaruh positif TPAK terhadap Indeks Pembangunan Gender di Indonesia Tahun 2013-2022.
4. H_0 : Tidak ada pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Gender di Indonesia Tahun 2013-2022.

H_a : Terdapat pengaruh positif Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Gender di Indonesia Tahun 2013-2022.

5. H_0 : Tidak ada pengaruh antara Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Gender di Indonesia Tahun 2013-2022.

H_a : Terdapat pengaruh positif antara Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Gender di Indonesia Tahun 2013-2022.

6. H_0 : Tidak ada pengaruh secara simultan antara Selisih Rata-Rata Lama Sekolah, Rata-Rata Upah, TPAK Laki-Laki dan Perempuan, serta Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Gender di Indonesia Tahun 2013-2022.

H_a : Terdapat pengaruh setidaknya satu dari variable bebas yaitu Rata-Rata Lama Sekolah, Rata-Rata Upah, TPAK Laki-Laki dan Perempuan serta Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Gender di Indonesia Tahun 2013-2022.

7. H_0 : Tidak ada perbedaan pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Rata-Rata Upah, TPAK, serta Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Gender di Indonesia Tahun 2013-2022 antara kelompok laki-laki dan kelompok perempuan.

H_a : Terdapat perbedaan pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Rata-Rata Upah, TPAK, serta Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Gender di Indonesia Tahun 2013-2022 antara kelompok laki-laki dan kelompok perempuan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada umumnya pendekatan penelitian dibagi menjadi dua jenis yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif (*quantitative research*). Creswell (2010) menyatakan bahwa, “pendekatan kuantitatif adalah pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah”. Menurut Sugiyono (2018), metode kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, yaitu sesuatu yang pasti, berdasar fakta dan data empiris yang ada. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan hubungan antarvariabel, mengembangkan model-model matematis, dan menguji teori atau hipotesis yang berkaitan.

Pada penelitian ini, penulis mereplikasi penelitian orang lain dengan meneliti ulang hipotesis-hipotesis yang telah dikembangkan oleh peneliti sebelumnya serta melakukan pengujian pada situasi yang berbeda. Penelitian ini menganalisis mengenai hubungan ketimpangan gender, pengeluaran pemerintah daerah dengan pembangunan manusia berbasis gender di Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen (terikat) dan juga variabel independen (bebas). Ruang lingkup penelitian ini adalah membahas mengenai hubungan antara rata-rata lama sekolah, rata-rata upah, tingkat partisipasi tenaga kerja laki-laki dan perempuan, serta pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan gender di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah 34 provinsi di Indonesia, tidak termasuk Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, pada tahun 2013 hingga tahun 2022.

3.2 Data dan Sumber Data

Data adalah sebuah informasi yang dapat menjelaskan fakta yang diolah dari bahan mentah baik secara kualitatif atau kuantitatif (Widarjono, 2018). Adapun beberapa jenis data menurut sumber dan cara pengumpulannya yang umumnya digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa data potong lintang / data antar wilayah (*cross section*) dari 34 provinsi di Indonesia dengan periode penelitian yang digunakan adalah data deret waktu (*time series*) pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2022, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel (*pooled data*) yaitu kombinasi dari data *cross section* dan *data time series*. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPk Kemenkeu).

3.3 Variabel Penelitian

Data dalam penelitian ini memiliki satuan ukur yang berbeda sehingga data asli harus ditransformasi atau di standardisasi sebelum bisa dianalisis. Pada penelitian ini transformasi data dilakukan menggunakan z-score. Nilai standar atau z-score adalah suatu bilangan yang menunjukkan seberapa jauh nilai mentah menyimpang dari rata-ratanya dalam distribusi data. Tujuan dilakukannya standardisasi adalah untuk menyamakan satuan, jadi nilai standar tidak lagi tergantung pada satuan pengukuran melainkan menjadi nilai baku. Akan tetapi karena semua nilai mendekati nol, ketika diuji kenormalan, biasanya akan menghasilkan data hasil yang tidak normal. Untuk itu peneliti menggunakan koefisien variabel, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah dua atau lebih kelompok data memiliki varians yang sama atau tidak. Parameter yang digunakan adalah parameter rasio skewness dengan kriteria sebaran data dikatakan normal jika nilai -2 s.d. 2 . Sedangkan jika menggunakan rasio kurtosis, sebaran data dikatakan normal jika nilai rasio skewness adalah -2 s.d. 2 .

a) Variabel Bebas (*Independent*)

Menurut Sugiyono (2018) definisi variabel bebas (*independen*) adalah variabel yang memengaruhi, menyebabkan adanya perubahan atau penyebab munculnya variabel terikat (*dependen*). Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa variabel independen yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (X1), Rata-Rata Upah (X2), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X3), Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (X4) dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (X5).

b) Variabel Terikat (*Dependent*)

Menurut Sugiyono (2018) yang dimaksud dengan variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya variabel bebas (*independent*). Dalam penelitian ini yang akan digunakan sebagai variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Gender (Y) yang merupakan hasil dari rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan perempuan.

Definisi Operasional Variabel

Menurut Gujarati (2013) pengertian dari 'operasional variabel' adalah sebuah konsep yang memudahkan dalam pengukuran variabel. Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam sebuah penelitian. Definisi Operasional variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani dalam satuan tahun. Dalam penelitian ini menggunakan rata-rata lama sekolah yang diukur dengan satuan tahun.

b. Rata-Rata Upah

Rata-Rata upah adalah banyaknya upah yang diterima oleh pekerja dibagi dengan banyaknya hari kerja pekerja dalam periode waktu yang sama dalam satuan rupiah. Dalam penelitian ini menggunakan rata-rata upah yang diukur dengan satuan rupiah (Rp).

c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur >10 tahun (BPS). Rumus untuk menghitung TPAK adalah jumlah penduduk bekerja dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan 100% Dalam penelitian ini menggunakan TPAK yang diukur menggunakan satuan persen (%).

d. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan

Pengeluaran pemerintah adalah sejumlah uang atau dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai kegiatan dan program dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan dan menyediakan barang-barang publik serta pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan. Dalam penelitian ini menggunakan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dengan satuan rupiah (Rp).

e. Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan

Pengeluaran pemerintah adalah sejumlah uang atau dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai kegiatan dan program dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan dan menyediakan barang-barang publik serta pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan. Dalam penelitian ini menggunakan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dengan satuan rupiah (Rp).

f. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender merupakan indikator yang mengukur capaian pembangunan manusia dengan turut mempertimbangkan aspek gender di dalamnya. Dalam penelitian ini Indeks Pembangunan Gender (IPG) dihitung menggunakan skala perbandingan (rasio) antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan perempuan. IPG diukur menggunakan satuan angka indeks.

3.4 Metode Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linier berganda, yaitu model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Uji ini digunakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara rata-rata lama sekolah, rata-rata upah, tingkat partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan, serta pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan gender di Indonesia baik secara parsial maupun secara bersama-sama (simultan). Analisis data dilakukan dengan menguji secara statistik variabel-variabel yang telah dikumpulkan dengan bantuan program Eviews 10. Pada Penelitian ini digunakan model persamaan sebagai berikut:

$$IPG = \alpha + \beta_1 RLS + \beta_2 RUP + \beta_3 TPAK + \beta_4 PEND + \beta_5 KES + e \quad (1)$$

$$IPG = \alpha + \beta_1 RLS_{Pr} + \beta_2 RUP_{Pr} + \beta_3 TPAK_{Pr} + \beta_4 PEND + \beta_5 KES + e \quad (2)$$

$$IPG = \alpha + \beta_1 RLS_{Lk} + \beta_2 RUP_{Lk} + \beta_3 TPAK_{Lk} + \beta_4 PEND + \beta_5 KES + e \quad (3)$$

IPG	= Indeks Pembangunan Gender
α	= Konstanta
β	= Koefisien regresi
RLS	= Rata-Rata Lama Sekolah Laki-Laki dan Perempuan
RUP	= Rata-Rata Upah Laki-Laki dan Perempuan
TPAK	= Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki dan Perempuan
PEND	= Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan
KES	= Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan
e	= Error term
Pr	= Perempuan
Lk	= Laki-Laki

3.5 Tahap Pengujian

Terdapat beberapa metode yang biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel. Pendekatan yang biasa digunakan ada 3 (tiga) yaitu:

- Pendekatan Pooled Least Square (PLS)
- Pendekatan Fixed Effect Model (FEM)
- Pendekatan Random Effect Model (REM)

Dalam menentukan model regresi data panel di antara tiga model yang telah disebutkan, maka hal yang harus dilakukan adalah melakukan pengujian. Terdapat 3 (tiga) uji, yaitu uji Chow untuk menguji model yang lebih baik antara CEM dan FEM, uji Hausman untuk menguji model yang lebih baik antara FEM dan REM dan, uji Breusch Pagan Lagrange Multiplier (BP-LM) untuk menguji model yang lebih baik antara CEM dan REM, Model regresi data panel yang terpilih perlu dilakukan pengujian asumsi klasik agar estimasi yang dihasilkan memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) (Gujarati, 2013).

Asumsi klasik model regresi data panel antara lain normalitas, homoskedastisitas, multikolinieritas, dan autokorelasi. Namun sebenarnya, pada analisis data panel tidak diperlukan uji asumsi klasik karena data panel dapat meminimalkan bias

hasil analisis, memberikan lebih banyak informasi, variasi, dan derajat kebebasan. Panel data memiliki data yang lebih kompleks yang memungkinkan untuk mempelajari mengenai perilaku dalam model sehingga pengujian asumsi klasik tidak terlalu diperlukan (Gujarati, 2013). Pada pengujian kali ini penulis tidak menggunakan uji autokorelasi, karena uji ini tidak digunakan pada data yang memiliki data *cross section*. Namun uji asumsi klasik tetap dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil analisis statistik yang lebih valid dan dapat dipercaya sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat.

Asumsi normalitas terpenuhi jika residual berdistribusi normal. Sementara itu, homoskedastisitas mengasumsikan bahwa residual dari model memiliki varians yang konstan ($var(\varepsilon_i) = \sigma^2$). Pelanggaran asumsi homoskedastisitas memiliki konsekuensi yaitu estimator yang dihasilkan pada metode OLS tetap linear, unbiased dan konsisten, tetapi tidak memiliki varians yang minimum sehingga estimator yang dihasilkan tidak efisien. Pemeriksaan multikolinearitas dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan antar variabel independen. Selanjutnya, pengujian keberartian model yang bertujuan untuk mengetahui keberartian model dalam menunjukkan hubungan antar variabel (parsial dan simultan) dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam model. Pengujian keberartian model dilakukan menggunakan pengujian parsial dengan uji t, pengujian simultan dengan uji F, dan koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted R²*).

1. Model Regresi Data Panel

a. CEM (*Common Effect Model*)

Common Effect Model atau *Pooled Least Square* adalah model atau metode estimasi paling sederhana dalam regresi data panel, dimana tetap menggunakan prinsip *Ordinary Least Square* (OLS). Pada model *common effect* ini tidak memperhatikan dimensi waktu dan juga dimensi individu atau *cross section*. Model ini menggabungkan data *cross section* dengan *time series* dan menggunakan OLS untuk mengestimasi model data panel (Widarjono, 2018)

b. FEM (*Fixed Effect Model*)

Fixed Effect Model mengansumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel. Model *Fixed Effect* menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intersep, namun *slope*-nya sama. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik *Least Square Dummy Variable (LSDV)*.

c. REM (*Random Effect Model*)

Random Effect Model akan mengestimasi data panel dimana variable gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model ini perbedaan intersep diakomodasikan oleh *error terms* masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model ini yakni menghilangkan heterokedastisitas. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model (ECM)* atau teknik *Generalized Least Square (GLS)*.

2. Uji Model Regresi

a. Uji Chow

Uji yang akan digunakan untuk mengetahui apakah model *Common Effect Model (CEM)* atau *Fixed Effect Model (FEM)* yang akan dipakai untuk estimasi model yang digunakan. Uji ini dapat dilakukan dengan uji *restricted F-test* atau uji *Chow-test*. *Chow Test* adalah pengujian untuk memilih apakah model yang digunakan *common effect* atau *fixed effect*.⁶⁴ Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Model *common effect*

H_a : Model *fixed effect*

Dasar penolakan terhadap hipotesis nol tersebut adalah dengan menggunakan *Chow* statistik (F statistik) hitung yang akan mengikuti distribusi statistik F dengan derajat kebebasan (df) sebanyak $n-1$ untuk *numerator*. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka H_0 ditolak sehingga teknik regresi data panel dengan *fixed effect* lebih baik dari *common effect*.

b. Uji Hausman

Uji selanjutnya dalam menentukan model estimasi yang paling baik adalah *Hausman Test*. Dalam uji ini model yang akan dibandingkan adalah *Random Effect* dan *Fixed Effect*. *Hausman Test* adalah pengujian statistik sebagai dasar pertimbangan dalam memilih model terbaik antara model *fixed effect* atau *random effect*. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Model *random effect*

H_a : Model *fixed effect*

Dasar untuk penolakan H_0 yaitu dengan menggunakan statistik Hausman dan membandingkannya dengan *chi-square*. Jika hasil pengujian *Hausman test* lebih besar dari tabel (nilai kritis statistik dari *chi-square*), maka H_0 ditolak yang berarti estimasi yang tepat untuk regresi data panel adalah model *fixed effect* dan sebaliknya

c. Uji Lagrange Multiplier

Uji yang terakhir dalam menentukan model estimasi paling tepat adalah Uji LM (*Lagrange Multiplier*). Di dalam uji ini, model yang akan dibandingkan adalah *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM). paling tepat adalah model REM. Sedangkan, Jika nilai signifikansi pada $Bot < 0.05$, maka model yang paling tepat adalah model CEM. *Lagrange Multiplier Test* adalah pengujian untuk memilih apakah model yang digunakan *common effect* atau *random effect*. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Model *common effect*

H_a : Model *random effect*

Uji LM ini didasarkan pada *probability* Breusch-Pagan, jika nilai *probability* Breusch-Pagan kurang dari nilai alpha maka H_0 ditolak yang berarti estimasi yang tepat untuk regresi data panel adalah model *random effect* dan sebaliknya.

3. Uji Asumsi Klasik

Model regresi linier berganda (*multiple regression*) dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), dan dapat dicapai bila memenuhi asumsi klasik.

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang digunakan, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk melakukan uji normalitas pada penelitian ini akan digunakan metode *Jarque-Bera (JB) normality test* dan uji rasio skewness dan kurtosis.

H_0 : residu tersebar secara normal

H_a : residu tidak tersebar secara normal.

Kriteria pengambilan keputusan untuk uji normalitas *Jarque-Bera* adalah jika nilai probabilitas dari statistik JB lebih besar dari α (0,05) maka kita gagal menolak hipotesis bahwa residual mempunyai distribusi normal. Jika nilai probabilitas dari statistic JB lebih kecil dari α (0,05) maka kita menolak hipotesis bahwa residual mempunyai distribusi normal. Sedangkan untuk pengambilan keputusan pada uji rasio skewness dan kurtosis residual dikatakan terdistribusi normal apabila rasio skewness dan kurtosis berada di antara -2 s.d. 2 (Hartono, 2004).

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah variabel pengganggu dari suatu regresi memiliki varian yang konstan dan tidak saling berhubungan antar satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas.

H_0 : $a_1 \equiv a_2 \equiv \dots \equiv a_i$, yang artinya tidak ada heteroskedastisitas atau homoskedastis, tidak ada hubungan antara X dengan residual.

H_a : paling sedikit atau satu $a_i \neq 0$, yang artinya terdapat heteroskedastisitas, terdapat hubungan antara X dengan residual.

Nilai hitung statistik *chi-squares* dapat diperoleh melalui :

$$nR^2 \sim \chi^2_{df}$$

— Jika nilai $nR^2 < \text{nilai } \chi^2 \text{ kritis}$ dengan derajat kepercayaan tertentu (α) maka H_0 tidak dapat ditolak, yang artinya tidak terdapat heteroskedastisitas atau homoskedastis.

- Jika nilai $nR^2 >$ nilai χ^2 kritis dengan derajat kepercayaan tertentu (α) maka H_0 ditolak, yang artinya terdapat heteroskedastisitas.

c. Deteksi Multikolinearitas

Pendeteksian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel bebas dalam satu regresi Widarjono, (2018), Pada penelitian ini akan dilakukan deteksi multikolinearitas dengan menggunakan metode untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas yaitu dengan menghitung korelasi parsial antar variabel independen. Sebagai *rule of thumb*, jika koefisien korelasi berada diatas 0,80 maka diduga terdapat multikolinieritas dalam model. Sebaliknya, jika koefisien korelasi relatif rendah maka diduga model tidak mengandung multikolinieritas.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi merupakan uji yang digunakan untuk menguji apakah suatu model regresi di dalamnya terdapat korelasi antara periode saat ini (t) dengan periode sebelumnya ($t-1$). Uji ini biasanya dilakukan untuk model data deret waktu (*time series*) dan hanya akan sia-sia atau tidak berarti jika dilakukan pada data *cross section* atau pun data panel. Berikut ketentuan dalam pengambilan kesimpulan untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi:

$0 < d < dL$	Terdapat autokorelasi positif
$dL \leq d \leq dU$	Tidak ada kesimpulan
$dU < d < 4 - dU$	Tidak ada autokorelasi positif/ negatif
$4 - dU \leq d \leq 4 - dL$	Tidak ada kesimpulan
$4 - dL < d < 4$	Terdapat autokorelasi negatif

- Bila nilai DW terletak di antara batas atas (dU) dan ($4 - dU$), maka koefisien korelasi sama dengan nol, yang berarti tidak ada korelasi.
- Bila nilai DW lebih rendah dari batas bawah (dL), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti terdapat autokorelasi positif.
- Bila nilai DW lebih besar daripada ($4 - dL$), maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif.

- Bila nilai DW terletak diantara batas atas (dU) dan batas bawah (dL) atau DW terletak antara $(4 - dU)$ dan $(4 - dL)$, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

4. Uji Keberartian Model atau Pengujian Hipotesis

a. Uji Keberartian Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Uji hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh masing-masing variabel dependen dapat menerangkan variabel dependen.

H_0 : variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat

H_a : variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat

— Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, maka H_0 tidak dapat ditolak yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

— Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak atau terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Selain itu dapat pula dilihat melalui nilai probabilitas (Prob.) Apabila nilai probabilitas masing-masing variabel bebas lebih kecil dari taraf signifikansinya (nilai Prob. $< 0,05$) maka H_0 ditolak atau terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

b. Uji Keberartian Koefisien Regresi Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

H_0 : $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k = 0$ (semua variabel independen secara bersama-sama tidak memengaruhi variabel dependen)

H_a : $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k \neq 0$ (semua variabel independen secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen)

— Jika $F\text{ hitung} < F\text{ kritis}$ maka H_0 tidak dapat ditolak, artinya variabel bebas yang digunakan secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

- Jika $F_{hitung} > F_{kritis}$ maka H_0 ditolak, artinya variabel bebas yang digunakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Selain itu dapat pula dilihat melalui nilai probabilitas (Prob.) Apabila nilai probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak atau semua variabel independen secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen.

c. Koefisien Determinasi R^2

Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen yang digunakan dapat menjelaskan variabel dependen. Apabila nilai R^2 mendekati 0 maka memiliki arti bahwa variabel independen yang digunakan dalam model memiliki keterbatasan dalam menjelaskan variabel dependen. Sedangkan jika nilai R^2 mendekati 1 berarti bahwa variabel dependen semakin baik atau mampu menjelaskan variabel dependen. Sedangkan *adjusted- R^2* merupakan R^2 yang telah disesuaikan dengan jumlah variabel. Jika selisih R^2 dengan *adjusted- R^2* $< 5\%$ maka menunjukkan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam model adalah baik, sedangkan jika selisih antara keduanya $> 5\%$ menunjukkan bahwa terdapat variabel yang buruk atau dapat merusak hasil estimasi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh gender gap serta pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan atas pengaruhnya terhadap pembangunan manusia berbasis gender di 34 provinsi Indonesia pada tahun 2013 hingga 2022. Adapun simpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

- 1) Rata-rata lama sekolah berpengaruh positif secara signifikan terhadap indeks pembangunan gender 34 provinsi Indonesia tahun 2013-2022. Peningkatan rata-rata lama sekolah bisa didorong mulai dari meningkatkan kesadaran tiap individu mengenai pentingnya pendidikan, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan kualitas sistem pendidikan, meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan lain sebagainya.
- 2) Rata-rata upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan gender 34 provinsi Indonesia tahun 2013-2022. Meskipun masih terdapat kesenjangan upah yang terjadi antar gender, namun terus terdapat perbaikan dan penyempitan kesenjangan upah dari tahun ke tahun.
- 3) Tingkat partisipasi angkatan kerja tidak signifikan terhadap indeks pembangunan gender 34 provinsi Indonesia tahun 2013-2022.
- 4) Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan gender 34 provinsi Indonesia tahun 2013-2022. Adanya hubungan pengaruh yang positif menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di tingkat daerah pada bidang pendidikan sudah sedikit banyak memberikan pengaruh pada kualitas sumber daya manusia melalui berbagai investasi mulai dari fasilitas pendidikan, perbaikan sistem pendidikan hingga peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik.

- 5) Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan gender 34 provinsi Indonesia tahun 2013-2022. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa investasi pemerintah pada bidang kesehatan masih perlu mendapat perhatian agar lebih efektif dan tepat sasaran.
- 6) Di antara variabel bebas yang digunakan yaitu rata-rata lama sekolah, rata-rata upah, tingkat partisipasi angkatan kerja, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan setidaknya satu dari kelima variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan gender 34 provinsi Indonesia tahun 2013-2022. Dengan mengabaikan variabel yang tidak dimasukkan ke dalam model, kelima variabel bebas yang digunakan memengaruhi perubahan nilai indeks pembangunan gender baik secara positif maupun negatif.
- 7) Dengan melihat hasil estimasi regresi serta uji signifikansi koefisien variabel yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan pengaruh antara variabel bebas yang digunakan yaitu rata-rata lama sekolah, rata-rata upah, tingkat partisipasi angkatan kerja, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap indeks pembangunan gender Indonesia dalam periode 2013 sampai 2022 antara variabel laki-laki dan perempuan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari pengolahan data dan pembahasan yang telah dilakukan, meskipun masih terdapat banyak kekurangan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dan pihak-pihak terkait yang membutuhkan. Saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus mampu bekerja sama dan lebih memperhatikan hal-hal yang dapat mereka beri dan sediakan sebagai lembaga penyedia layanan publik diluar kesadaran masyarakat secara individu utamanya dalam aspek pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di Indonesia. Selain itu, diperlukannya perubahan pola hidup dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri, bukan hanya

dari pemerintah saja, untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di Indonesia yang bisa turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

2. Pengeluaran pemerintah yang dilakukan kedepannya perlu direncanakan dengan lebih baik dan efektif, utamanya dalam hal ini untuk alokasi dana pendidikan dan kesehatan. Perlu dipertimbangkan lagi bagian yang harus lebih diperhatikan agar dapat mendorong produktivitas dan mendorong percepatan pembangunan.
3. Keterbatasan pada penelitian ini adalah tidak menggunakan dimensi umur panjang atau aspek kesehatan, sebagai dimensi yang ditetapkan PBB yang memengaruhi indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan gender. Sehingga pada penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat menggunakan komponen-komponen lain dalam indeks pembangunan gender yang belum dimasukkan dan metode yang lebih baik untuk menganalisis pembangunan gender sehingga dapat memberikan informasi dan saran kebijakan yang lebih spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Widarjono. (2018). *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya* (kelima). UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Ambya, A. (2020). How Government Spending on Public Sector Affect The Economic Growth? *Journal of Economics and Policy*, 13(1), 218–229. <https://doi.org/10.15294/jejak.v13i1.21943>
- Aprilianti, S., & Setiadi, Y. (2020). *Faktor-faktor Yang Memengaruhi Indeks Pembangunan Gender di Indonesia Tahun 2020*. 2020.
- Aridhayandi, R. M. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48, 883–902.
- Arifin, S., Sultan, U., Tirtayasa, A., Ekonomi, F., Raya, J., Km, J., & Banten, S. (2018). *Kesetaraan Gender dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. 27–42.
- Astuti, P. (2016). *Analisis Anggaran Responsif Gender Pada APBD Kota Semarang Tahun 2010-2013*. 7(1).
- Azizi, M. I., Komariyah, S., & Somaji, R. P. (2021). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga*. 31(1), 40–50. <https://doi.org/10.20473/jeba.V31I12021.40-50>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Keadaan Tenaga Kerja dan Rata-Rata Upah Buruh*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/05/05/2001/februari-2023/>
- Bappenas. (2020). *Pembentukan Tim Kordinasi Strategis Pengarusutamaan Gender*. <https://jdih.bappenas.go.id>
- Becker, G. S. (2018). Human Capital : A Theoretical and Empirical Analysis, with Spesial Reference to Education. *The University of Chicago Press*.
- Damsar. (2009). *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Prenada Media Grup.
- Dewi, M. K. (2019). *Pengaruh Pengeluaran Dana Pendidikan, Dana Kesehatan, dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Downes, R. and S. N. (2020). Designing and Implementing Gender Budgeting - A path to action. *OECD Journal on Budgeting*.

- Dr. Ikhlasiah Dalimoenthe, M. S. (2020). *Sosiologi Gender* (Bunga Sari Fatmawati (ed.); Kesatu). PT. Bumi Aksara.
- Elisa, I. (2022). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sumatera Barat Menggunakan Analisis Regresi Data Panel*. 7(2), 8–14.
- Elvina, E., & Zebua, M. (2019). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Partisipasi dan Implementasi Kebijakan dengan Efektifitas Pembangunan Program Dana Desa sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.32487/jshp.v3i1.509>
- Eva, S. (2008). *Perempuan Menggugat*. Rineka Cipta.
- Faelassuffa, A., & Yuliani, E. (2021). *Kajian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia*. 1(1), 49–61.
- Ferrant, G. (2010). The Gender Inequalities Index (GII) as a New Way to Understand Gender Inequality Issues in Developing Countries. *JEL Classification*, 106–112.
- Fleischhauer, K. (2007). *A Review of Human Capital Theory : Microeconomics*.
- Francine D Blau & Laxrence M Khan. (2007). The Gender Pay Gap : Have Women Gone as Far as They Can? *Journal Academy of Management Perspectives*, 21. <https://doi.org/https://doi.org/10.5465/amp.2007.2428161>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. . (2013). *Dasar-Dasar Ekonometrika* (5th ed.). Salemba Empat.
- Hartono Jogiyanto. (2004). *Metodologi Penelitian Bisnis* (2004th–2005th ed.). BPFE-Yogyakarta.
- Haryanto, S. (2008). Peran Aktif Wanita Dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin: Studi Kasus Pada Wanita Pemecah Batu Di Pucanganak Kecamatan Tugu Trenggalek *. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 9(2), 216. <https://doi.org/10.23917/jep.v9i2.1025>
- Herianingrum, S. (2021). *The Effect Of Government Expenditure On Islamic Human Development Index*.
- Ita Evi Lestari et. al. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Gender di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2019*.

- Jean, J., & Mongan, S. (2019). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan di Indonesia*. 4, 163–176.
- Julia Claves Mosse. (2003). *Gender dan Pembangunan*. Pustaka Pelajar.
- K Johansson. (2002). *Do Labor Market Programs Affect Labor Force Participation?*
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2021*.
- Kementerian PPPA. (2010). *Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bagi Daerah*.
- Khotimah, K. (2009). Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Sektor Pekerjaan. *Study Gender Dan Anak*, 4 No. 1.
- Kuncoro Mudrajat. (2013). *Indikator Ekonomi*. UPP STIM Yogyakarta.
- Kurniawan, A. W., & Fridiyanti, Y. N. (2023). *Analisis Anggaran Daerah Responsif Gender (Studi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati Tahun 2018)*. 9.
- Lorber, J., & Park, A. (2010). *Feminisms and Their Contribution to Gender inequality* (4th ed.).
- Lorenza, D. G. (2022). *The Role of Women's Participation in Development : Empirical Evidence from Indonesia*. 6(2).
<https://doi.org/10.18196/jerss.v6i2.15322>
- Maharda, J. B., & Aulia, B. Z. (2020). *Government Expenditure and Human Development in Indonesia*. 2(2), 81–94.
- Mangkoesebroto, G. (2018). *Ekonomi Publik*. BPFPE.
- Merang Kahang, Muhammad Saleh, R. B. S. (2016). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur*. 18(2), 130–140.
- Nairobi dan Riana Respitasari. (2021). *Public Infrastructure and Economic Growth in the Local Region*. 19(June), 51–60.
<https://doi.org/10.29259/jep.v19i1.13826>
- Napitupulu, F. (2022). *Ketimpangan Gender dan Pertumbuhan Ekonomi di Negara- Negara Asia Timur dan Pasifik*. 1(1), 29–43.
- Nursini, N., & Syahrul, S. (2022). *Tinjauan Peran Kualitas Gender dalam*

- Pembangunan Ekonomi. 1*, 14–27.
- P M Romer. (1990). Endogenous Technological Change. *Journal of Political Economy*, 98(5), 71–102.
- Prasetio, T. W. D. (2018). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung*. Universitas Islam Negerin Raden Intan Lampung.
- Prayudha Ananta, M. E. B. M. Kamal, & N. M. (2023). Public Spending, Corruption and Human Development: Empirical Evidence in Middle Income Countries. *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences*, vol 131, 561–579. <https://doi.org/https://doi.org/10.15405/epbs.2023.11.48>
- Publicuho, J., Sudirman, F. A., Susilawaty, F. T., Oleo, U. H., Kendari, K., & Tenggara, S. (2022). *Kesetaraan Gender Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) : Suatu Review Literatur Sistematis*. 5(4), 995–1010.
- Rahmawati, F., Aini, A. N., & Camila, E. M. (2021). Analysis of Gender Development Index in East Java. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 6(1), 61–72. <https://doi.org/10.31002/REP.V6I1.3356>
- Rozaini, H. F. & N. (2023). *Ananlisis Faktor-Faktor Indeks Pembangunan Gender di Provinsi-Provinsi Pulau Sumatra Tahun 2011-2021*. 3(3), 1409–1416.
- Sadono, S. (2006). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Raja Grafindo Persada.
- Sandri, K. Putri, Ayu. & Dwirandra, A. (2014). Kemampuan Alokasi Belanja Modal Moderasi Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Buletin Studii Ekonomi*, 21, 1.
- Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan*. Bumi Aksara.
- Sulisto, D., Purba, S. F., & Aritonang, K. B. (2023). *Does Women ' s Role Have an Influence on Economy Growth in Indonesia ?* 12(3).
- Suwanda, A. T., & Nurhayati, S. F. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Gender di Keresidenan Pati Tahun 2017-2021. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 3(4), 586–594.
- Syahadi, F. S., Aliria, E., Erza, O., & Syafri, M. (n.d.). *Pengaruh Pengangguran dan Upah Minimum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di DKI Jakarta. 1*, 1–16.
- Syahidin & M Syafii. (2022). *Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap*

pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi aceh. 2(1).

- T W Schultz. (1961). Investment in Human Capital. *Journal American Economic Review*, 51, 1–17.
- Todaro & Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (9th ed.). Erlangga.
- Umam, K., Suparman, N., & Kunci, K. (2022). *Anggaran Responsif Gender : Meminimalisir Disparitas Partisipasi dan Akses Perempuan dalam Pembangunan. 4*, 53–62. <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v4i2>
- United Nation Development Program (UNDP). (1990). *Global Human Development Report*.
- United Nations. (2015). *17 Goals Sustainable Development Goals*. <https://sdgs-un-org>
- Vidyanagar, V., Member, F., & Vidyanagar, V. (2020). “ *Impact of Gender Inequality on Female Labour Force Participation : A Literature Review .*” 8(9), 2667–2672.
- World Economic Forum. (2023). *Global Gender Gap Report 2023*. <https://www.weforum.org>
- World Economic Forum. (2024). *Pal et al 2024 global gender gap report 2024* (Issue June).